



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

## NEGERI EMPAL GENTONG



## Dari Redaksi



**S**yukur dan tahniah kami ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan petunjuk dan rahmat-Nya kami mampu menyelesaikan satu karya spesial untuk pembaca budiman Majalah Cirebon Katon.

Pada September 2024, anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 akan mengakhiri masa tugasnya, dan akan dilanjutkan legislator terpilih hasil pemilihan legislatif tahun 2024.

Dengan itu, maka usia majalah Cirebon Katon juga akan genap lima tahun sejak pertama kali di-

orbitkan dari sebelumnya bernama Berita Informasi Wakil Rakyat (Biwara).

Sebagai rasa syukur sekaligus kenangan atas kinerja terbaik legislator periode ini, kami sajikan edisi khusus ini untuk pembaca setia Cirebon Katon.

Edisi khusus di tangan pembaca ini merupakan penjabaran dari dokumen pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang dikemas melalui tulisan ringan dan mudah untuk dibaca.

Tulisan-tulisan ini memadukan gambaran kondisi saat ini, pemikiran kritis, dan gagasan serta

mimpi besar Kabupaten Cirebon. Kami berharap, karya kecil ini akan menginspirasi sekaligus menjadi pijakan bagi pembangunan Kabupaten Cirebon di masa mendatang.

Dalam waktu dekat, kita juga akan menghadapi Pilkada 2024. Kami berharap, siapapun kepala daerah yang terpilih nanti dapat meneruskan dan merealisasikan gagasan-gagasan pokir DPRD ini pembangunan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi (Kang Luthfi) yang telah menyumbangkan pikirannya menulis penjabaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini. Kepiawan mengemas gagasan dan kekayaan informasi yang disajikan, membuka mata bahwa Kabupaten Cirebon cukup tertinggal, harus segera berbenah, dan optimis akan Cirebon menuai kemajuan.

Di tengah kesibukannya menjadi pimpinan legislator, Kang Luthfi masih bisa menyempatkan waktunya untuk menulis. Menunjukkan Kang Luthfi memiliki dedikasi dan komitmen untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan terbuka dengan pergulatan pemikiran.

Kami berharap, edisi ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat, bukan hanya bagi pemerintah daerah, melainkan akademisi, praktisi, politisi dan seluruh masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang selama ini terus mendukung kami dalam menyajikan informasi dan publikasi wakil rakyat.

Dengan semangat tinggi, kerja keras serta berkarya menjadi motivasi kami tim redaksi untuk dapat menerbitkan edisi khusus yang kami namai Negeri Empal Gentong ini. Kami pun mengapresiasi kepada seluruh tim anggota redaksi Cirebon Katon yang telah bekerja keras.

Kami berharap, karya kecil ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan. Sekaligus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Edisi khusus ini juga menjadi buah tangan DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 untuk seluruh masyarakat Cirebon. Selamat membaca. Salam Cirebon Katon.

### PEMBINA/PENASEHAT :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si

(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE

(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH

(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan, S.E.

(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

### PENGARAH :

Hj Eriati

(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

(Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.

(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T

(Ketua Komisi 1)

R. Hasan Basori

(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M

(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si

(Ketua Komisi 4)

### PIMPINAN UMUM/PIMPINAN REDAKSI :

Asep Pamungkas, SP, MP

(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

### WAKIL PIMPINAN REDAKSI :

drh. Encus Suswaningsih M.Si

(Kabag Humas Protokol, Kerjasama dan Aspirasi)

Isnaeni Jazilah, S.H, M.H

(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

### REDAKTUR PELAKSANA :

Dra. Puti Amanah Sari

(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

### REDAKSI AHLI :

S. Yudi

### REDAKTUR :

Yusuf

### REPORTER :

• Riyan • Amir

### FOTOGRAFER :

Qusoy

### DESAIN GRAFIS :

Boyke Datu

### DATA DAN RISET :

Oman

### DISTRIBUSI :

Firman • Misbah

### KORESPONDENSI:

redaksi.cika@gmail.com

### PENERBIT :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

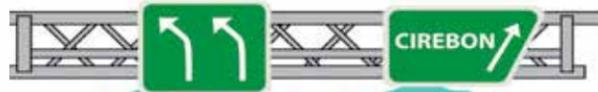
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611

## Daftar Isi

Dari Redaksi **2**

Prolog: Negeri Empal Gentong **5**



No Banjir, Sampah, Jalan Berlubang **8**

Pendidikan Dasar dan Vokasi **10**

Kawasan Industri **12**



Kawasan Pariwisata Terintegrasi **14**

Pertanian **16**

Perikanan Tangkap **18**

Transportasi **20**



Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024 **22**

Reformasi Birokrasi **24**

Gedung Kesenian **26**

Branding **28**

Olahraga **30**

Kependudukan **32**



Kesehatan **34**

Ibukota Sumber **36**

BUMD **38**

Epilog: Inilah Negeri Bahagia **40**

## Prolog Negeri Empal Gentong

Empal gentong —sebagai representasi akulturasi budaya Arab, India, Cina, Jawa, dan masyarakat lokal—sarat akan filosofi. Salah satunya tentang nilai peradaban dan martabat bangsa. Akankah Cirebon ke depan bermartabat seperti halnya nilai yang terkandung dalam empal gentong?



Sering kami mendapat kunjungan dari DPRD kabupaten/kota lain. Di sela obrolan serius, biasanya selalu kami sisipkan perbincangan ringan seputar kuliner Cirebon. Promosi lah begitu. Suatu ketika ada tamu yang cukup kritis,

dia bertanya:

“Pak kenapa masakan yang seperti gulai di Cirebon itu namanya empal gentong? Bukankah empal itu daging sapi yang diiris tipis lalu digoreng?”

Wajar sih orang bertanya seperti itu. Di Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan empal seperti itu. Tapi sebagai tuan rumah kita harus siap dengan pertanyaan kritis, terlebih pertanyaan terhadap kekhasan daerah.

Kami jelaskan bahwa empal itu adalah daging yang empuk. Nah, nama di belakangnya merujuk pada proses atau metode pengempukan daging. Di daerah lain ada empal gepuk. Wujudnya daging sapi goreng. Metode pengempukannya dengan di-gepuk (ditumbuk atau dipukul dengan benda tumpul). Jadilah namanya empal gepuk.

Sedangkan di Cirebon, daging diempukkan dengan cara direbus di dalam gentong selama beberapa jam. Untuk itulah namanya empal gentong. Di Cirebon yang diempukkan bukan hanya daging, tapi juga kikil, jeroan dan kepala.

Menariknya, empal gentong sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Pemerintah Jawa Barat, pada 2 Februari 2022. Sementara, di pemerintah pusat, sejak Januari 2016, statusnya baru tercatat sebagai WBTB, belum ditetapkan sebagai WBTB.

Nah, silakan kalau sebelumnya menikmati empal gentong hanya sebagai kulineran; sekarang nikmatilah empal gentong sebagai sajian warisan budaya. Adakah perbedaan rasa?

Kalau belum ada bedanya, mari saya tambahkan narasi penambah kelezatannya. Empal gentong konon berdasarkan cerita rakyat sudah ada sejak tahun 1400-an, atau abad ke-15.

Sebagai pusat perdagangan kala itu, pelabuhan Cirebon adalah tempat bertemunya para saudagar dari Arab, Cina, India, Jawa, dan lokal Cirebon. Empal gentong adalah representasi gabungan masakan atau bumbu dari kelima budaya itu.

Karena lahir dari peradaban yang cukup tua, empal gentong pun sarat filosofi. Daging yang empuk diibaratkan sebagai manusia. Bahwa manusia adalah makhluk yang lemah tanpa daya. Untuk itu manusia tak perlu sombong.

Daging dalam empal gentong itu memiliki rasa ketika disajikan dengan kuah bumbu. Begitu pun manusia, dia akan bermartabat ketika dalam kehidupannya mengusung nilai sosial, budaya, dan agama. Jadi, bumbu ini pengibaratan nilai yang harus menyelimuti bahkan terserap di dalam diri manusia.

Semakin bumbu itu meresap ke dalam daging, rasa empal gentong semakin enak. Manusia pun begitu, semakin nilai menginternalisasi dan diadopsi dia semakin bermartabat.

Sedangkan gentong adalah pengibaratan dari aturan kerajaan, negara, atau pemerintah. Kumpulan manusia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di sebuah pemerintahan. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan.

Daging tidak akan empuk, jika di luar gentong. Jika ada sebagian di dalam

gentong dan sebagian di luar gentong maka akan terjadi kekacauan rasa, yang satu empuk yang lainnya alot. Lebih parah lagi, jika gentong itu pecah, maka daging itu tidak akan menjadi masakan bernama empal gentong.

Pelajarannya, manusia harus taat dengan aturan pemerintah. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan keamanan dan ketertiban. Konsekuensi terburuknya, negara itu bisa bubar.

Lantas bagaimana kah caranya agar gentong sebagai kiasan pemerintahan itu bisa berjaya dan membawa kebahagiaan bagi rakyatnya? Sudah kah

Kabupaten Cirebon hadir sebagai negeri yang sejahtera dan membahagiakan?

Hari ini kita mendapati Kabupaten Cirebon terpuruk sebagai sebuah kabupaten. Di banding kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon berada di tiga besar paling miskin dan angka pengangguran terbesar.

Indikator kemiskinan itu dikuatkan dengan PDRB harga berlaku Kabupaten Cirebon yang baru mencapai Rp 61 triliun. Artinya pendapatan per kapita orang sebesar Rp. 2,08 juta per bulan. Angka ini masih jauh dari besaran UMR di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2,45 juta.

Kondisi ini semakin sulit dengan kondisi infrastruktur di Kabupaten Cirebon yang belum memadai terutama kondisi jalan yang sangat mengganggu pergerakan orang dan barang. Aktivitas ekonomi terganggu.

Banjir juga masih menjadi ancaman tahunan bagi pertanian dan pergerakan ekonomi lainnya. Pun demikian dengan sampah dan lingkungan kumuh yang masih mengganggu wajah Cirebon dari sisi wisatawan.

Kondisi itu semakin terkonfirmasi dengan jebloknya rapor reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon. Peringkat ketiga dari bawah di Jawa Barat. Rendahnya kinerja birokrasi ini tentu saja bukan hanya sekadar angka dari Kemenpan RB, tapi juga tervalidasi dengan banyak keluhan masyarakat mengenai rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama pengurusan administrasi kependudukan.

Dengan kondisi itu, agar Cirebon segera keluar dari berbagai masalah dan mengejar ketertinggalan, perlu ada upaya ekstra dari pemerintah Ka-

bupaten Cirebon ke depan. Harus ada pemimpin yang memiliki visi kuat dan mampu melakukan upaya-upaya terobosan.

Edisi Khusus Majalah Cirebon Katon ini adalah curahan pemikiran yang lahir dari kondisi keprihatinan tersebut. Ide dan gagasan di majalah ini semata-mata meluncur demi melihat Cirebon ke depan benar-benar Bahagia.

Pemikiran-pemikiran tersebut hadir dari diskusi-diskusi panjang, dari satu forum ke forum lainnya di DPRD. Ini adalah persembahan kami semua (DPRD Kabupaten Cirebon Periode 2019-

1024) untuk Cirebon. Agar Cirebon ke depan selezat empal gentong.

Tentu saja tanpa mengurangi makna dan kecintaan pada Cirebon, penyematan Negeri Empal Gentong hanya-lah sebatas media komunikasi. Agar ide-ide pembangunan Cirebon lebih menarik untuk diperhatikan dan mudah didiskusikan.

Penyematan nama Empal Gentong juga sebagai sebuah nilai sekaligus harapan bahwa Cirebon ke depan adalah negeri yang bermartabat, sejahtera, dan bahagia seperti nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi empal gentong.

Penyematan nama Empal Gentong juga sebagai sebuah nilai sekaligus harapan bahwa Cirebon ke depan adalah negeri yang bermartabat, sejahtera, dan bahagia seperti nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi empal gentong.

Tulisan-tulisan dalam edisi ini sebenarnya merupakan penjabaran dari dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon. Dengan penjabaran ini harapannya akan lebih mudah dipahami untuk semua pihak, terutama untuk masyarakat luas. Sehingga antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki visi pembangunan yang sama: Cirebon yang Bermartabat dan Bahagia.

**Empal gentong sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Pemerintah Jawa Barat, pada 2 Februari 2022. Sementara, di pemerintah pusat, sejak Januari 2016, statusnya tercatat sebagai WBTB.**

**Penyematan nama Empal Gentong juga sebagai sebuah nilai sekaligus harapan bahwa Cirebon ke depan adalah negeri yang bermartabat, sejahtera, dan bahagia seperti nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi empal gentong.**

# No Banjir, Sampah, Jalan Berlubang

Bila ingin banjir, sampah hingga jalan berlubang teratasi, pemerintah daerah harus mampu melakukan langkah extra ordinary juga kemampuan lobi anggaran di tingkat provinsi dan pusat.



## Selamat tinggal banjir air mata, lubang di hati, dan sampah kenangan

**B**elum lama saya mengunjungi rumah salah satu warga di Waled yang tergenang banjir kiriman Sungai Cisanggarung. “Kang iki ari udan gede kuh, wilayah Cirebon banjir maning banjir maning, priben kih? Pegel kang, ari wis meengen,” ujar warga.

Saya tentu tak bisa menjawab banyak. Memang ini adalah tahun kelima saya mengunjungi wilayah banjir. Hampir tiap tahun, banjir di Kabupaten Cirebon tak pernah absen. Tahun ini semakin parah, karena ada sembilan kecamatan yang terendam banjir kiriman.

“Ari wis mekennen bae, terus solusine apa kang?” Pertanyaan itu, sebenarnya mewakili banyak kelu-

han yang sering saya dengar. Saya jawab dengan sedikit menjelaskan, solusi pertama: normalisasi sungai.

Kalau kita lihat, kondisi sungai di Kabupaten Cirebon sangat memprihatinkan. Di hulu, lebar sungai 40 meter, di hilir, lebarnya pun sama. Tapi saat di tengah, memasuki pemukiman dan pedesaan, lebar sungai menjadi 7 meter. Berkurang setengahnya, akibatnya *bottleneck* : air keluar dan menerjang pemukiman.

Maka inilah pentingnya memiliki backhoe apung yang selalu *standby* di tiap sungai utama untuk pengerukan. Pemerintah daerah bisa melakukan lobi anggaran untuk pengadaan back-

hoe apung.

Kedua, perlunya membuat embung-embung di beberapa titik rawan banjir seperti Waled dan Gunungjati. Embung ini selain berguna menampung air hujan, juga bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian saat kemarau tiba. Khusus di Sungai Condong, penting membuat sodetan guna mengurangi debit banjir.

Ketiga, perbaikan drainase secara menyeluruh. Ini juga berguna untuk mencegah kerusakan jalan atau lubang-lubang jalan saat musim hujan tiba.

Saya pernah membaca komentar warganet di sosial media. “*Lamon wis manjing dalam rusak lan bolong-bolong, berarti wis manjing Cirebon,*” tulisnya dalam kolom komentar sosial media. Saya tak membantah.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ruas jalan dengan kondisi rusak ringan pada 2023 sepanjang 338,78 kilometer, rusak sedang 99,12 kilometer, dan 92,35 kilometer mengalami rusak berat.

Selain drainase, perbaikan jalan juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Lagi-lagi kemampuan lobi tim anggaran Kabupaten Cirebon kurang maksimal, jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan yang setiap tahun mendapatkan bantuan keuangan lebih

dari Rp 300 miliar untuk infrastruktur.

Bagaimana dengan sampah? Sampah juga menjadi penyebab mengapa sungai-sungai cepat teresimentasi.

Belum lagi bila melihat sampah yang berserakan di jalan karena tak tersedianya TPS. Pemandangan ini semakin menegaskan Cirebon ‘darurat sampah’.

Pentingnya pengelolaan sampah di tiap desa dengan menyediakan TPS harus segera dilakukan. Selain itu, optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kubangdeleg dengan memperbaiki sarana jalan. Terakhir penambahan dan peningkatan armada angkut sampah. Bila perlu, bisa dengan menggandeng pihak swasta untuk menyewakan armada.

Inilah pentingnya menyiapkan segala rencana pembangunan Kabupaten Cirebon yang berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Pemerintah daerah harus mampu melakukan lobi ke pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan bantuan keuangan. Sehingga bila ditanya kenapa jalan tak segera diperbaiki? Tak lagi menjawab: *langkah anggarane*.

Bila semua itu telah dilakukan, bukan tak mungkin harapan Kabupaten Cirebon *no banjir, sampah dan jalan berlubang* segera terwujud.

### BEBAS BANJIR

- Pembuatan waduk Cipanundan dan situ di titik-titik banjir
- Revitalisasi situ yang ada
- Normalisasi sungaa dan rekayasa aliran sungai (membuat sodetan)
- Drainase jalan

### BEBAS SAMPAH

- Peningkatan pengolahan sampah di TPA Gunug Santri dan TPA Kubangdeleg
- Peningkatan akses jalan ke TPA Kubangdeleg
- Pembuatan TPS tiap desa dan kecamatan
- Peningkatan armada angkut

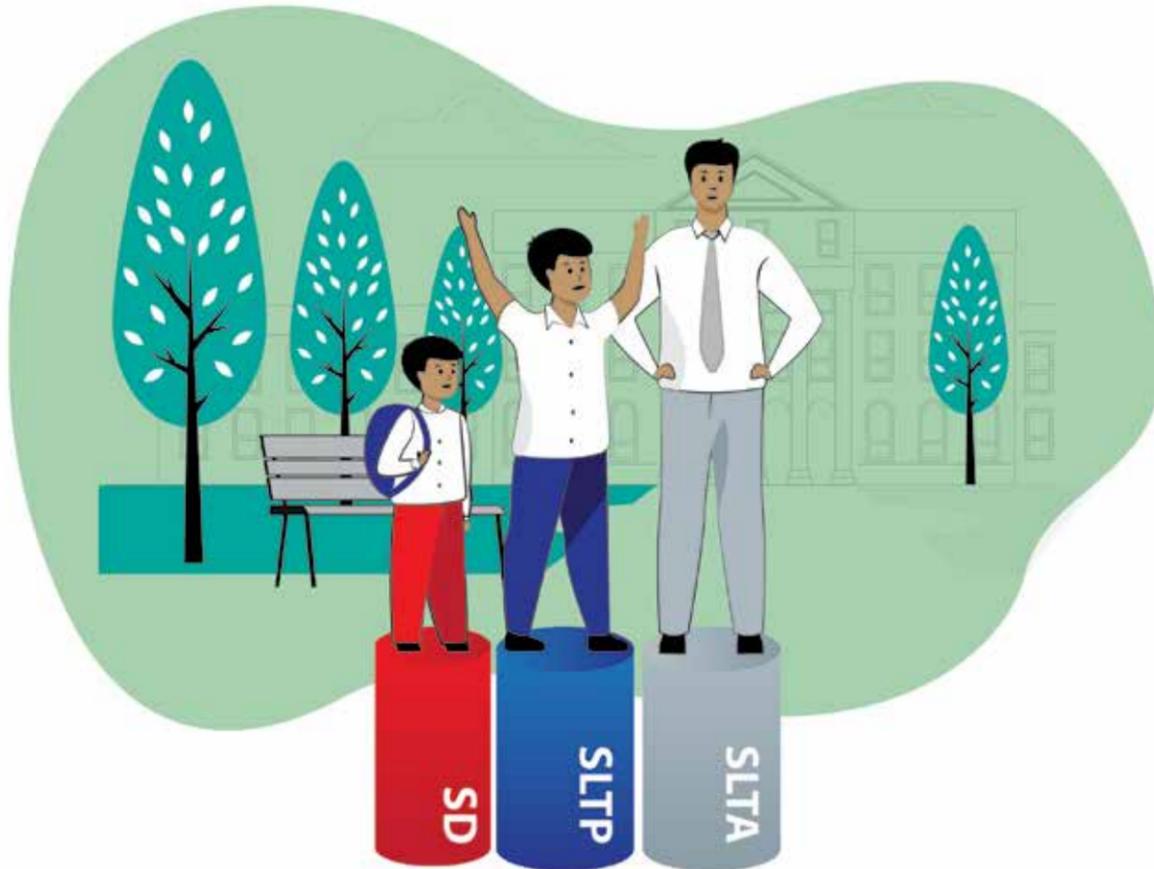
### BEBAS JALAN BERLUBANG

- Optimalisasi peningkatan anggaran pusat dan provinsi untuk perbaikan jalan
- Tim Reaksi Cepat Tambal Jalan

# Pendidikan Dasar dan Vokasi

Pemerintah daerah harus memastikan sarana dan kualitas pendidikan dasar 12 tahun tersedia. Pendidikan vokasi harus benar-benar kawin dengan dunia industri.

## Wisuda Pendidikan Dasar 12 Tahun



Saya sempat bertanya pada diri sendiri, sebenarnya, butuh berapa tahun untuk melihat perubahan sebuah daerah. Tiga atau empat tahun? Atau hingga akhir jabatan kepala daerah?

Di tahun pertama, saya ingat bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Cirebon masih berada di angka 6.92: setara kelas 6 sekolah dasar (SD). Sementara di tahun 2023 angkanya sedikit naik

menjadi 7,64 poin: setara kelas 1 SMP, atau kira-kira hampir kelas dua SMP. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita kejar bersama karena masih tingginya angka putus sekolah.

Pemerintah daerah harus memastikan jumlah sekolah di Kabupaten Cirebon seimbang. Ada disparitas jumlah sekolah. Sebut saja jumlah sekolah dasar (SD) sederajat yang saat ini berjumlah 855; sementara jumlah SMP hanya 215; SMA 53 dan

SMK 109 (data BPS).

Terdapat *blank spot* di beberapa kecamatan. Sebut saja di Kecamatan Jamblang memiliki terdapat 21 SD, namun hanya memiliki 2 SMP dan 2 SMA. Tak kalah memprihatinkannya, Kecamatan Kedawung dan Depok bahkan belum memiliki SMA negeri.

Untuk memenuhi target pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Cirebon, harus dipastikan ketersediaan jumlah kelas yang ada di masing-masing jenjang. Jangan sampai angka putus sekolah dikarenakan daya tampung yang tidak memadai pada jenjang berikutnya.

Selain membangun ruang kelas dan sekolah baru, tentu saja harus dicarikan alternatif lain. Salah satunya dengan mengatur jam sekolah (sekolah sore) atau hari sekolah (sekolah akhir pekan). Juga bisa memberikan kemudahan bagi swasta yang ingin mendirikan sekolah, terutama di daerah *blankspot*.

Sementara bagi yang putus sekolah, kita harus jemput bola. Pastikan mereka tetap dapat mengenyam pendidikan, misalnya melalui PKBM atau program kejar paket di setiap desa. Pemerintah Desa harus proaktif jika ada warganya yang putus sekolah.

Kedua, kita harus pastikan pendidikan vokasi yang berkualitas. Pendidikan vokasi di sekolah-sekolah kejuaraan atau balai latihan kerja harus benar-benar mencetak SDM yang terampil dan siap kerja.

Pemerintah daerah harus bisa memfasilitasi antara sekolah dan industri untuk berkomunikasi

dan bekerjasama. Ini penting agar *interlink* atau *link and match* antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja terjalin.

Pendidikan vokasi baik SMK-SMK atau lembaga pelatihan keterampilan di Kabupaten Cirebon harus 'menikah' dengan industri dan dunia kerja. Terlebih, saat ini kita menyambut kawasan industri wilayah timur Cirebon.

Selain soal ketersediaan ruang kelas, masalah

kompleks pendidikan dasar lainnya juga harus segera diurai. Antara lain banyak gedung dan meja/kursi yang rusak, kekurangan buku perpustakaan, kekurangan guru, kesejahteraan guru, dan kualitas lulusan yang rendah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: Peningkatan anggaran pendidikan dan alokasinya secara tepat; Pelatihan dan peningkatan kesejahteraan guru; Pengembangan kurikulum yang relevan dan adaptif sesuai kebutuhan lokal; Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan akses teknologi; dan Mengatasi kesenjangan digital.

Program kesehatan dan gizi yang terpadu dengan pendidikan; dan Mengatasi kesenjangan digital.

Untuk menyelesaikan itu semua, agar kebijakan yang dibuat pemerintah mengena perlu melibatkan para pemangku kepentingan, terutama murid, orang tua, dan komunitas dalam merumuskan sebuah kebijakan. Sehingga anggaran yang tersedia bukan hanya terserap tapi juga menyelesaikan masalah.

- Pembuatan sekolah baru terutama di daerah yang blankspot
- Pembuatan ruang kelas baru
- Pelatihan dan peningkatan kesejahteraan guru
- Pengembangan kurikulum yang relevan dan adaptif sesuai kebutuhan local
- Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan akses teknologi
- Program kesehatan dan gizi yang terpadu dengan Pendidikan
- Mengatasi kesenjangan digital

# Kawasan Industri

Pengangguran dan kemiskinan harus diselesaikan dari hulu, yakni tersedianya dan terciptanya lapangan kerja (baru). Kawasan industri harus segera terbangun di Kabupaten Cirebon.



**T**entu saja tak habis pikir, jika ada yang beranggapan bahwa memerangi pengangguran dan kemiskinan dengan BLT. Apalagi nilai BLT-nya tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.

Bahwa hal itu membantu, itu iya. Namun, tidak menyelesaikan masalah.

Itu adalah kelemahan-lemahnya usaha. Kewajiban pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja,

di berbagai bidang, baik kelautan, pertanian, pariwisata, maupun industri.

Lihatlah beberapa daerah yang serius membangun pariwisata dan kawasan industri melesat keluar dari kemiskinan. Sumbangsih terhadap PDRB sangatlah besar. Sebut saja Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Kendal.

Kawasan industri di Bekasi merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan luas sekitar 5.600 hektar. Menampung lebih 1.500 perusahaan dari 30 negara. Sektor industri yang ada di sini meliputi otomotif, elektronik, kimia, logistik, dan makanan.

Dilengkapi dengan fasilitas standar internasional: pembangkit listrik, pengolahan air, jaringan listrik, layanan keamanan 24 jam dan sistem telekomunikasi yang canggih.

Tak heran kawasan industri bekasi ini menyumbang 77,46 % (Rp 393 triliun) dari total PDRB. Bahkan ranking pertama penyumbang PDRB Jawa Barat. Sungguh angka yang fantastis.

Sementara di Kabupaten Purwakarta, sumbangsih kawasan industri terhadap PDRB yakni 58,34 % (Rp 76,48 triliun); Kabupaten Karawang 71 % (Rp 268 triliun). Sedangkan, Kawasan Industri Kendal menyumbang 41,86 % dari PDRB.

Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Harus diakui sumbangsih sektor industri terhadap PDRB kita baru mencapai 20% (Rp 12,4 triliun). Kita masih tertinggal jauh dengan kabupaten lain.

Selain itu industri sangat membantu menggerakkan ekonomi dan uang berputar di masyarakat. Sebagai ilustrasi satu pabrik sepatu yang memiliki 20 ribu karyawan dengan UMR Rp 2,4 jt. Dalam sebulan, uang yang berputar melalui gaji kurang lebih Rp 48 miliar.

Itu baru satu pabrik, bagaimana bila itu puluhan

sampai ratusan pabrik? Maka kawasan industri harus dibuat segera sebagai bentuk fasilitasi Pemda mendorong tumbuhnya industri dan pabrikasi di Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah harus memiliki visi yang jelas dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran.

Industri harus segera dibuat kawasan, agar tidak tumbuh liar di sekitar jalan tol. Dengan keberadaan kawasan, dampak lingkungan, baik alam maupun sosial, lebih dapat diminimalisasi.

Dalam rang itu, pertama, kita harus memperkuat keberadaan kawasan industri di Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Perda RTRW harus mengatur dan mengintegrasikan kawasan industri dengan kawasan strategis lainnya.

Kedua, membuat rencana besar (grand design) kawasan industri. Misalnya, berencana membuat akses ke kawasan secara terpadu baik darat, laut, maupun udara.

Jika daerah Losari, Pabedilan, dan Pangenan dipilih sebagai kawasan industri, maka menarik jika membuat jalan poros industri yang menghubungkan tiga moda transportasi.

Dari pintu tol Ciledug dibuat jalan yang menghubungkan *dry port* (di sekitar Stasiun KA Losari) hingga ke pelabuhan baru di Losari.

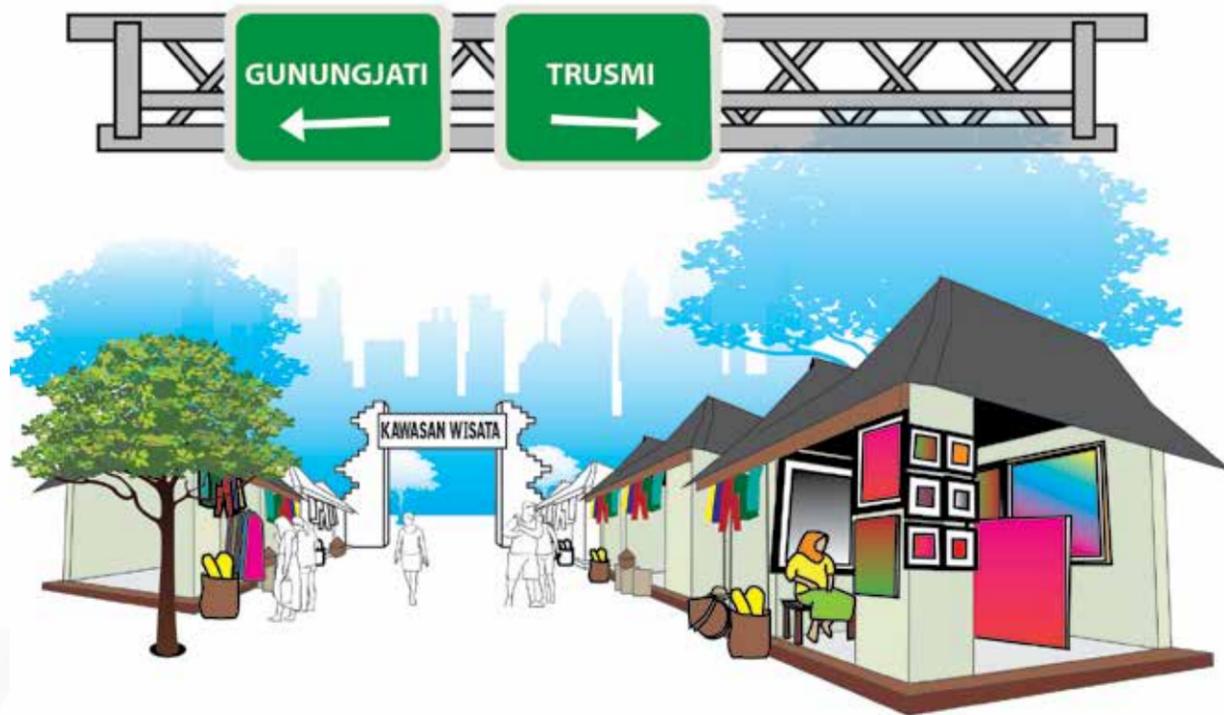
Dari Stasiun KA Losari ke depan harus mempunyai koneksi ke bandara Kertajati. Dari Stasiun Jatibarang perlu dibangun rel menuju Kertajati. Sehingga kawasan Cirebon, Indramayu, Brebes dan Tegal mudah mengakses Kertajati.

Selain, industri, konektivitas ini juga akan sangat berdampak pada pariwisata dan perdagangan. Jika ini terjadi, PDRB Kabupaten Cirebon di atas Rp 100 triliun bukanlah mimpi. Pun demikian dengan kemiskinan dan pengangguran di bawah 5%.

- Membuat kawasan industri terpadu
- Membuat Pelabuhan industri
- Membuat jalan poros yang menghubungkan pintu tol, stasiun KA, dan Pelabuhan
- Membuat akses bar uke bandara Kertajati via jalur kereta api

# Kawasan Pariwisata Terintegrasi

Pemimpin Cirebon harus mampu menyelesaikan lima permasalahan pariwisata yang ada. Plus membangun Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dan interkoneksi antar-KSP.



## Kawasan Pariwisata Gunungjati-Trusmi

**D**estinas wisata harus bisa menarik pelancong dan membuat *naqih*. Rasa wisata harus hadir di setiap destinasi, dan membangun hubungan emosional dengan pengunjung. Cirebon punya potensi destinasi yang beragam, dan

setiap hari ribuan wisatawan berkunjung. Namun, pariwisata Kabupaten Cirebon masih dianggap jalan di tempat.

Sebelumnya, mari kita lihat permasalahan yang dihadapi pariwisata Kabupaten Cirebon. **Pertama**,

infrastruktur belum memadai. Akses jalan menuju beberapa objek wisata masih belum bagus. Hal ini membuat wisatawan kesulitan mencapai destinasi.

Fasilitas umum, seperti toilet, tempat parkir, dan tempat sampah, di beberapa objek wisata masih kurang lengkap. Penginapan dan restoran yang tersedia belum memadai untuk menampung jumlah wisatawan yang terus meningkat.

**Kedua**, promosi belum maksimal. Banyak wisatawan yang belum mengetahui destinasi menarik yang ada di Kabupaten Cirebon. Seperti situs Plangon, banyak dikunjungi wisatawan luar daerah, tanpa promosi dan infrastruktur seadanya.

**Ketiga**, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan pengelolaan dan promosi wisata tidak terarah dan tidak efektif.

**Keempat**, kualitas sumber daya manusia (SDM) belum memadai. Pelaku usaha pariwisata banyak yang belum mengikuti pelatihan tentang bagaimana melayani wisatawan dengan baik. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan wisata masih kurang. Juga perlu regenerasi SDM di sektor wisata budaya.

**Kelima**, daya saing dan kreativitas. Perlu upaya kreatif untuk mendongkrak destinasi yang ada agar memiliki daya saing yang kuat dibanding kabupaten lain. Juga perlu dibangun interkoneksi antar destinasi di kabupaten Cirebon.

Kelima permasalahan itu harus segera dijawab dan diselesaikan. Salah satunya dengan membangun **Kawasan Strategis Pariwisata (KSP)**. Kawasan ini harus mampu mengintegrasikan potensi

wisata religi Gunung Jati dan Kawasan Batik Trusmi.

KSP harus mampu memaksimalkan potensi kunjungan sekitar 2.500 wisatawan per hari ke Gunung Jati. Untuk itu KSP yang dibangun pertama berupa jalan poros wisata yang menghubungkan Gunung Jati dengan Trusmi. Jalan ini kurang lebih sepanjang tujuh kilometer.

Gunung Jati-Trusmi ini dijadikan KSP. Sepanjang jalan poros itu harus dibangun pusat kuliner, pusat pentas seni dan budaya, wahana wisata permainan, pusat oleh-oleh, penginapan/hotel, dan

pendukung pariwisata lainnya.

Akses menuju KSP juga harus ditingkatkan. Selain dari pintu tol terdekat (pintu tol Plumbon) juga perlu dibangun infrastruktur jalan yang memanfaatkan jalur kereta api. KSP ini berdekatan dengan Stasiun KA Cangkring.

Untuk itu harus ada infrastruktur yang mempermudah wisatawan mengakses KSP dari stasiun. Selain membangun jalan, perlu juga disiapkan bus gratis pariwisata yang mengantarkan wisatawan dari stasiun menuju KSP dan sebaliknya.

Dari KSP juga perlu dibangun interkoneksi dengan destinasi lainnya, seperti wisata alam di kawasan Palimanan, Plangon, pantai losari, dan destinasi wisata religi/budaya lainnya.

Jika mengacu pada Raperda Ripparda, terdapat sembilan KSP. Namun tentu saja sembilan KSP ini masih dikaji untuk ditetapkan menjadi Perda. Beberapa pun nanti KSP yang ditetapkan, pemimpin ke depan harus mampu membangun interkoneksi ke sembilan KSP tersebut. Tentu saja, rasa wisata harus tetap menjadi ruh destinasi.

- Membuat kawasan strategis wisata Trusmi-Gunungjati
- Membuat jalan poros baru Trusmi-Gunungjati
- Peningkatan akses ke destinasi potensial
- Pembuatan agenda event seni dan budaya skala nasional dan internasional
- Integrasi kegiatan olahraga dan pariwisata

# Pertanian

Jika dikelola dengan baik, pertanian adalah sektor yang seksi untuk melawan angka kemiskinan. Masalahnya sejauh mana kita serius membangun pertanian seperti halnya para petani Jepang.



Betul bahwa Kabupaten Cirebon sudah mampu swasembada beras. Namun, itu saja tidak cukup untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Pertanian harus menjadi salah satu ujung tombak perang melawan kemiskinan.

Dalam rangka itu perlu kita petakan dulu permasalahan pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon. Setidaknya ada **tujuh** permasalahan yang perlu segera diurai agar swasembada beras bisa dipertahankan, plus dapat memerangi kemiskinan.

**Pertama**, bencana banjir dan kekeringan. Pada

Februari 2023 banjir mengakibatkan sekitar 3.074 hektar sawah gagal tanam. Sementara pada musim kemarau lahan pertanian sering kekeringan. Tentu saja keduanya berpengaruh pada produksi pertanian.

Untuk itu perlu ada upaya makro yang komprehensif untuk menanggulangi banjir pada saat penghujan dan kekeringan pada saat kemarau. Di satu sisi menyelesaikan ancaman bencana, namun di sisi yang lain juga menyelesaikan ancaman terhadap produksi pertanian.

Upaya yang patut dikaji lebih jauh adalah dengan membangun waduk, embung, atau setu di

beberapa titik strategis. Fungsi waduk ini untuk menampung air saat penghujan sehingga mencegah banjir; dan menjadi cadangan air pada saat kemarau untuk dapat tetap mengairi pertanian.

**Kedua**, akses air. Infrastruktur irigasi terbatas. Selain dibutuhkan pembangunan irigasi baru, saluran irigasi lama juga sudah rusak. Ini yang menyebabkan petani kesulitan mengairi sawah terutama saat kemarau. Sering kita mendengar petani berkelahi gegara rebutan air.

Akses air pertanian juga di beberapa daerah terganggu dengan pencemaran limbah industri. Limbah ini tentu saja mengganggu Kesehatan dan ekosistem pertanian. Untuk itu perlu adanya pembangunan irigasi yang terintegrasi dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

**Ketiga**, kelangkaan pupuk. Petani kerap menemui kelangkaan pupuk di pasaran. Kalau pun ada biasanya dengan harga yang lebih mahal. Perlu adanya upaya pemerintah daerah yang menjalin kerja sama dengan produsen pupuk agar ketersediaan pupuk terjaga.

Bila diperlukan dan menguntungkan secara bisnis, bisa membuat pabrik pupuk baru di kawasan industri yang akan dibangun di Cirebon. Alternatif lainnya adalah memberdayakan petani untuk mulai mengombinasikan penggunaan pupuk organik.

**Keempat**, regenerasi petani. Kebanyakan generasi muda kurang berminat untuk menggeluti pertanian sebagai pilihan pekerjaan. Faktor upah rendah dan anggapan sebagai pekerja kasar membuat mereka enggan.

Untuk itu pemerintah perlu membuat program yang melibatkan generasi muda untuk aktif dalam membangun pertanian dan industri pertanian. Program petani milenial adalah salah satu contoh yang

patut untuk dikembangkan.

Saatnya generasi muda dengan segala inovasinya meningkatkan produksi pertanian. Sehingga pertanian adalah bidang yang menjanjikan secara bisnis. Dengan inovasi dan penerapan teknologi, pertanian bukan lagi pekerjaan kasar.

**Kelima**, Keterbatasan modal dan teknologi. Kebanyakan petani di Cirebon adalah petani kecil dengan modal terbatas, dan generasi tua dengan pengetahuan terbatas. Padahal di beberapa negara yang mempunyai produktivitas pertanian tinggi justru mengedepankan teknologi.

Penerapan teknologi, regenerasi pertanian, dan akses permodalan harus menjadi program yang

terintegrasi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan reformasi agraria menuju pertanian yang lebih produktif dan menarik secara ekonomi.

**Keenam**, tata niaga dan akses pasar. Petani sering mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen dengan harga yang wajar. Hal ini disebabkan oleh panjangnya rantai tata niaga, infrastruktur yang kurang memadai, dan ulah spekulasi yang memainkan harga di pasaran.

Dengan teknologi informasi, pemerintah daerah harus membuat sebuah sistem yang membuka akses pasar. Sekaligus juga sistem yang dapat memetakan hasil produksi pertanian per komoditas per daerah. Ini penting untuk membuat alur tata niaga agar hasil pertanian mudah terserap dengan harga yang kompetitif.

**Ketujuh**, alih fungsi lahan. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan komersial marak terjadi. Lahan pertanian produktif menjadi menyusut. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam menegakkan Perda RTRW harus optimal dan disiplin. Tidak boleh memberikan izin pengolahan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Pembangunan waduk untuk memastikan ketersediaan air
- Peningkatan sarana irigasi
- Kerjasama swasta untuk penyediaan pupuk
- Membuka akses pemasaran produk pertanian
- Penerapan teknologi pertanian

# Perikanan Tangkap

Laut di Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang luar biasa sehingga harus menjadi prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa yang harus dilakukan?



## Ini baru laut sebagai beranda depan

**P**ernahkah mendengar kisah kejayaan Muara Djati Cirebon? Sebuah nama yang disematkan untuk pelabuhan kapal-kapal besar sekaligus simpul perdagangan Nusantara dan pelayaran antarbangsa.

Sungguh takjub, bila mendengar cerita Muara Djati. Ya, kita sempat memiliki pelabuhan yang menjadi salah satu simpul penting dalam lalu lintas

perdagangan antar-negeri. Laut menjadi beranda depan Cirebon.

Namun coba kita lihat hari ini. Masihkah kita memiliki pelabuhan yang dapat menampung kapal besar? Seberapa besar kapal-kapal nelayan kita? Berapa pendapatan para nelayan dalam sehari? Berapa kilo ikan yang mampu mereka tangkap dalam sekali berlayar? Dimana mereka menjualnya? Bagaimana hidupnya hari ini?

Kondisi kelautan kita cukup memprihatinkan. Sebut saja dalam ruang perikanan tangkap, yang kalah jauh dibanding kabupaten tetangga, Indramayu. Retribusi dari 7 tempat pelelangan ikan (TPI) hanya mampu menyumbang Rp 100 – Rp 150 juta untuk PAD Kabupaten Cirebon.

Mengapa? Karena kita tak memiliki kapal besar dan alat tangkap seadanya. Kemampuan kapal nelayan kita hanya berukuran 20 sampai 30 GT. Tak heran kemampuan produksi kita hanya 10 ribu ton per tahun.

Maka menjadi penting kita harus memiliki kapal berukuran 200-300 GT agar produksi hasil laut kita meningkat. Mahal, tentu saja, namanya juga kapal besar. Namun, bukan berarti tidak mungkin memiliki bukan? Karangsong adalah contohnya, nelayan sudah terbiasa melambungkan kapal 200-300GT.

Jika APBD dirasa berat untuk membelinya, maka kita masih punya pemerintah provinsi dan pusat. Lagi-lagi, pendekatan dan kejelasan program harus mampu meyakinkan pemerintah pusat atau provinsi.

Selain kapal kapasitas besar tentu saja harus diimbangi dengan akses masuk kapal. Jika pantai dan sungai dangkal maka kapal-kapal besar akan kesulitan bersandar. Normalisasi muara dan pelayaran

harus dilakukan.

Masalah lainnya, para nelayan hari ini, mengandalkan hutang pada tengkulak untuk berlayar. Sehingga terpaksa menjual hasil tangkapannya pada tengkulak, ketimbang melalui TPI. Tentu dengan harga yang lebih murah.

Hal yang paling penting dan mendasar, bagaimana pemerintah daerah bisa menguatkan, memperbesar sekaligus meningkatkan produktivitas perikanan tangkap seperti Indramayu. Kita harus siapkan ekosistem kelautan yang bisa memastikan itu terjadi.

Siapkan industri pengolahan perikanan tangkap berikut dengan akses kemudahan permodalan.

- Normalisasi pelabuhan perikanan dan muara sungai agar kapal besar bisa bersandar
- Fasilitasi penyediaan kapal besar 200-300 GT
- Membuka akses pasar perikanan tangkap
- Peningkatan industri pengolahan ikan

Misalnya dengan memastikan koperasi khusus nelayan dan memfasilitasi penjualan. Pemerintah daerah harus mampu membangun relasi dengan para eksportir industri perikanan baik nasional dan internasional.

Industri pengolahan perikanan tangkap ini harus terintegrasi dengan rencana pembuatan kawasan industri. Artinya kawasan industri yang dibangun harus mampu memaksimalkan pengolahan

ikan hasil laut. Begitupun dengan pembangunan fasilitas perikanan tangkap harus disesuaikan dengan rencana pembuatan kawasan industri.

Laut di Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang luar biasa sehingga harus dijadikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau produksi perikanan kita meningkat, pasti pendapatan masyarakat juga meningkat.

Luas wilayah laut harus dieksplorasi untuk kemaslahatan, perbaikan dan peningkatan hidup masyarakat Kabupaten Cirebon. Pada akhirnya, kita tidak boleh lagi miskin di tengah laut yang kaya.

# Transportasi

Ada yang mengatakan bahwa seseorang gagal menjadi kepala daerah jika tidak mampu menata angkot. Bener juga sih, karena kemajuan sebuah daerah dapat dilihat dari ekosistem transportasi yang ada.



## Asyik... Cirebon bisa sekeren ini

**A**ngkot ngetem sembarangan, bikin macet dan semrawut jalan. Jika jalan, ugal-ugalan, tak nyaman, dan jaminan keamanan yang rendah. Di Cirebon masa depan, hal itu tak

boleh terjadi. Kisah itu harus sekadar menjadi cerita, tak ada lagi di dunia nyata. Ngimpi? Tidak. Itu visi Cirebon ke depan yang harus diwujudkan. Sulit? Tentu saja bagi yang tidak

mau berusaha. Yakinlah itu bisa diwujudkan. Banyak daerah lain yang sudah mewujudkan kok.

Kuncinya adalah bagaimana membangun ekosistem transportasi yang baik. Ekosistem yang mampu mengintegrasikan segala potensi dan segala moda transportasi yang ada. Mari berkaca pada Jakarta, kemudian memikirkan mungkinkah hal itu diterapkan di Cirebon.

Jakarta memiliki transportasi umum *commuter line* (KRL) yang diselenggarakan PT. KAI. Kemudian pemerintah daerah menggagas transjakarta dan jaklingko. Bahwa kemudian itu MRT dan LRT itu hal lain. Commuter line, transjakarta, dan jaklingko, lebih memungkinkan untuk diterapkan di Cirebon.

Mari kita memahami dulu tentang transportasi komuter. Komuter adalah seseorang yang bepergian ke suatu tempat untuk beraktivitas (bekerja, berdagang, sekolah) dan kembali ke tempat tinggalnya setiap hari (bepergian bukan untuk tinggal permanen di daerah tujuan).

Nah, *commuter line* PT KAI selain di Jakarta juga diterapkan di Yogyakarta-Palur, Prambanan, Merak, Bandung, Surabaya, dan Bandara Soekarno-Hatta. Artinya hal serupa juga bisa dibuat untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya: Tegal-Brebes-Cirebon-Indramayu (TBCI). *Commuter line* ini akan lebih menarik jika tersambung dengan bandara Kertajati via Stasiun Jatibarang.

Di wilayah Kabupaten Cirebon saja kini sudah ada 11 stasiun, yang merupakan pertemuan dua jalur besar KA, utara dan selatan. Stasiun tersebut adalah Kaliwedi (non aktif), Arjawinangun, Bangoduwa, Cangkring, Waruduwur, Babakan, Losari, Luwung, Sindanglaut, Karangsuwung (non-aktif), dan Ciledug.

Jika *comuter line* diselenggarakan, dua stasiun

yang non aktif bisa diaktifkan Kembali, bahkan jumlah stasiun bisa ditambah. Tugas pemerintah daerah kemudian membuat transportasi umum berbasis bus seperti transjakarta, sebut saja transcirebon.

Transcirebon inilah yang membangun konektivitas dari satu titik ke titik lain dengan stasiun KA. Konektivitas yang harus dibangun adalah dari wilayah utara ke selatan (dari Kapetakan ke Sumber, Dukupuntang dan Greged). Jika ini terselenggara maka jalur timur-barat melalui *commuter line*, dan utara-selatan via transcirebon.

Berikutnya adalah memperbanyak angkutan

pengumpan dari pelosok Cirebon ke titik transcirebon dan KRL. Caranya? Persis seperti jaklingko, memanfaatkan angkot yang sudah ada terintegrasi dengan KRL dan transcirebon.

Dengan pola pengelolaan angkot model jaklingko, seharusnya tidak ada lagi kisah angkot ngetem sembarangan, ugal-ugalan, dan membuat kemacetan. Pasalnya kebutuhan dasar pengusaha dan sopir untuk memperoleh keuntungan terpenuhi, dengan pola hibrid: pembayaran

dari masyarakat dan subsidi.

Nah, karena karakteristik komuter adalah mengatasi pergerakan orang secara harian, maka ekosistem transportasi ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kawasan strategis lainnya, terutama kawasan industri, ibukota sumber, dan kawasan pariwisata. Termasuk juga keberadaan pelabuhan dan bandara.

Jadi sederhananya, Cirebon ke depan memiliki kawasan industri, kawasan ibukota, kawasan perdagangan, dan kawasan strategis pariwisata, yang terkoneksi dengan baik dan nyaman oleh moda transportasi publik. Yuk, kita wujudkan.

- Maksimalisasi stasiun stasiun KA dengan pembuatan *commuter line*.
- Membuat jalur transcirebon yang menghubungkan Cirebon utara dan selatan
- Optimalisasi angkutan kota yang ada dengan sistem seperti jaklinko

# POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

## Rata-Rata Lama Sekolah 12 Tahun

Jangan ada lagi anak putus sekolah di Kabupaten Cirebon.

Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Cirebon 6,92 tahun (2020), 7,1 tahun (2021), dan 7,4 tahun (2022).

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Open Data Kabupaten Cirebon.

## UHC (Universal Health Coverage) 100%

100% warga yang memiliki KTP Kab. Cirebon memiliki jaminan kesehatan

Pada 2023 96,07 % warga Kabupaten Cirebon sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

## Administrasi Kependudukan Prima

Fasilitas dan sistem kependudukan secara daring dan jumlah alat cetak KTP memadai

Pada 2020 sebanyak 30 persen alat rekam data KTP Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Cirebon mengalami kerusakan.

## Cirebon Bebas Sampah

- Pembangunan TPS Desa, Kecamatan, dan TPA Kabupaten
- Penguatan armada dan sistem pengangkutan

Estimasi produksi sampah di Kabupaten Cirebon 1.100 ton/hari

## Angka Kemiskinan & Pengangguran Menuju 5%

Bangun kawasan industri, pariwisata, dan UKM berdaya.

Proporsitas penduduk miskin 12,01%, dan pengangguran 8,11%.

Sumber: BPS, Open Data Jabar, 2022.

## Cirebon Bebas Banjir

Cirebon Harus Bebas Banjir saat Penghujan, dan tidak kekeringan saat kemarau.

Sebanyak 15 kecamatan yang rawan banjir. Ada 67 kejadian banjir pada 2021.

Sumber: BPBD, Open Data Kabupaten Cirebon

## Cirebon Bebas Jalan Berlubang

Pemantapan jalan dan pembuatan sistem drainase

100,855 KM jalan rusak berat; 96,140 KM jalan rusak; 352,344 KM mantap sedang; dan 690,965 mantap baik.

Sumber: DPUTR Kabupaten Cirebon, 2022.

## PDRB Menuju 100 Triliun/Tahun

Ekosistem pertumbuhan ekonomi dihidupkan dengan hilirisasi

PDRB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Cirebon 2022 sebesar Rp 56.653,64 triliun

## Pajak Daerah Menuju 1 Triliun /Tahun

Ekonomi berdaya, pungutan pajak tanpa kebocoran

Pendapatan pajak daerah pada 2022 sebesar Rp 263 miliar.

Sumber: BKAD, Open Data Kabupaten Cirebon BPS, Open Data Jabar, 2022.

## Pembangunan Kawasan Industri Cirebon Timur

Kawasan Industri menarik investasi, ekonomi tumbuh

Realisasi investasi 2019 sebesar Rp8,97 triliun; 2020 turun ke Rp4,95 triliun; 2021 Rp4,86 triliun; dan 2022 sebesar Rp4,36 triliun.

Sumber: DPMTSP

## Pembangunan Kawasan Ibukota Sumber

Kota Sumber Asri, Bersih, dan Nyaman

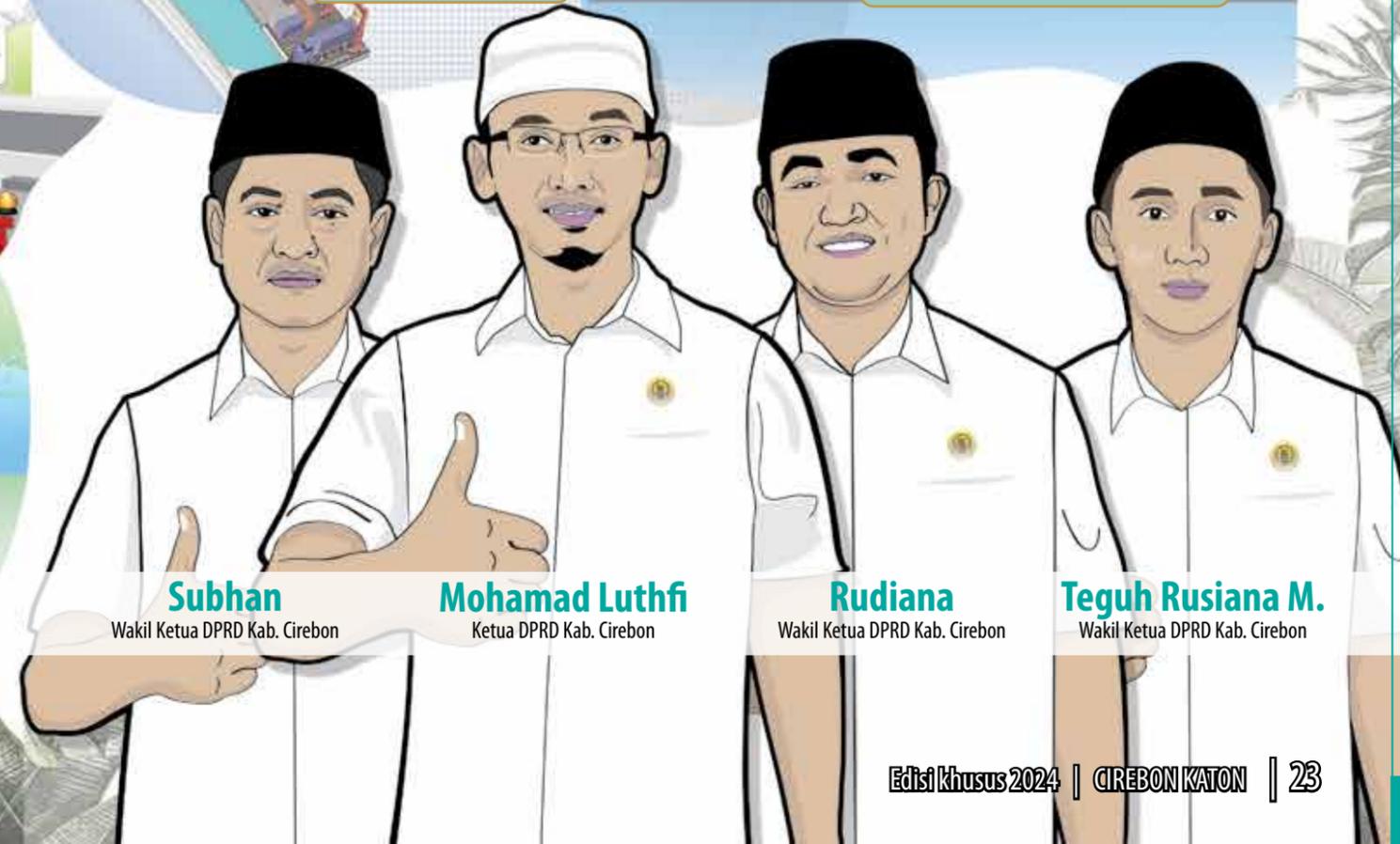
Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, masuk kategori dan ditetapkan sebagai Kawasan kumuh

Sumber: SK Bupati; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP)

## Interkoneksi sentra-sentra wisata terjalin

Waktu kunjungan jadi lebih lama, dan uang berputar lebih banyak

Kunjungan wisatawan nusantara ke Kab. Cirebon setiap hari sebanyak 2.300 (70.000 per bulan), namun rata-rata lama tinggal di Kab. Cirebon hanya 3 jam.



**Subhan**

Wakil Ketua DPRD Kab. Cirebon

**Mohamad Luthfi**

Ketua DPRD Kab. Cirebon

**Rudiana**

Wakil Ketua DPRD Kab. Cirebon

**Teguh Rusiana M.**

Wakil Ketua DPRD Kab. Cirebon

# Reformasi Birokrasi

Katakan tidak dengan jual-beli jabatan. Ini penyakit kronis penyebab mesin birokrasi melemah. Ujungnya, masalah masyarakat tidak terselesaikan dan Cirebon tetap miskin.



## Tolak jual beli jabatan

Jangan berharap terlalu jauh untuk memerangi banjir, sampah, jalan berlubang, kemiskinan dan pengangguran, jika mesin birokrasi tak bekerja optimal. Pun demikian, jangan ber-

harap mereka bekerja optimal jika mereka berada di zona tak nyaman bekerja. Apa yang salah? Sebelumnya mari kita lihat posisi Kabupaten Cirebon di banding kabupaten/kota lainnya di Jawa

Barat dalam hal reformasi birokrasi. Selama tiga tahun berturut-turut dari 2020-2022, indeks reformasi birokrasi (IRB) Kabupaten Cirebon selalu berada di bawah angka 60, alias berpredikat CC.

Untuk berpredikat B harus di atas 60 poin. Data Kemenpan RB dan juga tertuang dalam *Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Jabar*, bahwa pada 2020 Kabupaten Cirebon mencapai 56,18 poin, 2021 berada di 56,81 poin, dan pada 2022 mencapai 56,95 poin. Di banding kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Cirebon berada di peringkat ke-25 di Jabar, alias berada di posisi tiga terendah.

Jebloknya IRB juga dapat dilihat dari rendahnya ketercapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih di bawah 3,00, artinya implementasi SPBE belum baik; Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa di bawah 70 poin, alias dalam kondisi tidak baik; dan nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di bawah 78 poin alias di zona kuning.

Indikator statistik Kemenpan RB itu ekuivalen dengan data perekonomian, seperti peringkat kemiskinan dan pengangguran, dimana Kabupaten Cirebon juga berada di zona peringkat tiga termiskin. Pun demikian, dengan rendahnya pendapatan per kapita per orang manusia Cirebon yang hanya berkisar Rp 2,08 juta (di bawah UMR Rp 2,45 juta).

Artinya rendahnya kinerja birokrasi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu reformasi birokrasi tidak bisa ditawar, apalagi ini merupakan amanat Undang-Undang.

Lantas apa yang menyebabkan birokrasi berkinerja lemah? Saya melakukan kajian kecil-kecilan selama beberapa tahun terakhir. Kesimpulannya ASN banyak yang tidak nyaman bekerja, dan lemahnya

kepemimpinan dalam membuat perencanaan, inovasi, dan mengawal kinerja.

Untuk soal ketidaknyamanan ada dua faktor utama. Pertama soal isu jual-beli jabatan. Namanya juga isu, desas-desus, susah dibuktikan. Namun, jika ini benar maka tentu ini menjadi fondasi perusak kinerja birokrasi.

Sekali lagi ini bukan sekadar perusak, tapi fondasi perusak. Dengan jual-beli seseorang bisa ditempatkan tidak berdasarkan kapasitas dan kapabilitas. Akibatnya orang yang memiliki kecakapan dan keahlian justru bukan pada posisi ideal.

Nah, soal penempatan orang bukan pada kotak yang seharusnya inilah menjadi masalah yang kedua. Beberapa kali saya menjumpai aparatur

- Penerapan merit sistem
- Penempatan SDM sesuai keahlian, kapasitas, dan kapabilitas
- Menolak praktik jual-beli jabatan
- Pelatihan SDM dengan orientasi peningkatan pelayanan publik dan kualitas anggaran

yang demikian. Kalau yang ini bisa saya buktikan. Kalau soal isu jual-beli itu bukan ranah tulisan ini.

Namun, demikian tulisan ini hanya mengajak bahwa mari kita perangi jual-beli jabatan, baik itu sudah dipraktikkan oleh oknum saat ini atau belum. Ke depan kita bersama harus menolak praktik seperti itu.

Kenapa kita? Ya, karena Anda harus berani

menolak orang yang menawarkan jualan ke Anda. Jangan beri kesempatan para oknum menikmati pembelian Anda.

Berikutnya merit sistem ditegakkan. Sumber daya manusia harus dikelola berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, dan disiplin aparatur.

Jika hal itu berjalan, nilai reformasi birokrasi dengan sendirinya akan terdongkrak. Indikator kinerja akan membaik dan ujungnya pelayanan terhadap masyarakat akan paripurna, kualitas belanja anggaran akan membaik, dan Cirebon akan bahagia.

# Gedung Kesenian

Saatnya Kabupaten Cirebon memiliki gedung kesenian yang mumpuni, berorientasi pariwisata, dan menjadi pusat penggerak ekonomi kreatif.



## Rakyat terhibur, seniman Makmur...

Cirebon sudah terlanjur terkenal memiliki kekayaan budaya dan seni. Begitulah memang lazimnya kota (kabupaten) tua, dan kawasan pesisir warisan kejayaan negeri

maritim. Sayangnya, kekayaan seni budaya yang harusnya melahirkan kesejahteraan ini, justru kini perlahan menuju kepunahan.

Sering mendapat pertanyaan dari daerah lain,

bagaimana Cirebon melestarikan budaya tersebut? Mereka beranggapan bahwa seni dan budaya Cirebon baik-baik saja. Sebaik nama besar Cirebon.

Jujur saya tidak bisa menjawab pertanyaan mereka secara gamblang. Saya belum melihat adanya upaya terintegrasi yang telah dan sedang diupayakan pemerintah untuk melambungkan kesenian Cirebon. Buktinya, dari 58 kesenian khas Cirebon, 30 di antaranya kini terancam punah.

Kesenian yang masih bertahan kebanyakan berjuang melestarikannya secara mandiri, ada sentuhan pemerintah tapi tak banyak. Saatnya mereka tak lagi sendiri kepedulian dan aksi nyata harus dibangkitkan.

Pembinaan dan kaderisasi seniman harus dilakukan dengan menghidupkan sentra-sentra seniman di setiap kecamatan. Pusat kreativitas ini akan membidani lahirnya generasi-generasi baru pelestari kesenian dan kebudayaan Cirebon.

Agar suguhan kesenian semakin menarik dan berdaya wisata, harus dibangun satu gedung kesenian terpadu di Kabupaten Cirebon. Gedung ini harus menjadi ikon kesenian Cirebon, sekaligus sebagai pemersatu para seniman dan pekerja seniman.

Gedung kesenian ini sedikitnya memiliki empat fungsi utama. Pertama, sebagai pusat pelatihan dan regenerasi kesenian Cirebon. Secara berkala di gedung ini akan digelar perlombaan dengan peserta para seniman muda yang lahir dari sentra-sentra kesenian di setiap kecamatan.

Perlombaan ini memiliki peran strategis untuk mendorong dan memotivasi para sanggar atau sentra kesenian di setiap kecamatan untuk melahirkan generasi terbaik. Perlombaan juga menjadi wahana apresiasi bagi para pejuang pelestari budaya dan seni.

Kedua, gedung kesenian ini berfungsi sebagai

pusat pertunjukan seni yang berkelas dan berteknologi canggih. Seni yang disuguhkan dengan baik dengan dukungan alat, tempat dan fasilitas yang memadai akan semakin bernilai tambah. Sebagai sebuah suguhan pertunjukan, ia akan semakin lezat dan berkelas.

Tentu saja itu akan menjadi daya tarik bagi penikmat seni, dan ujungnya menaikkan daya jual yang dapat mendongkrak kesejahteraan seniman. Sebagai pusat pertunjukan, gedung kesenian ini juga bisa untuk menggelar kegiatan seni dan budaya yang merupakan agenda resmi pemerintah.

Ketiga, gedung kesenian harus berfungsi sebagai bagian terintegrasi dari industri pariwisata di Kabupaten Cirebon.

Agenda rutin pagelaran di gedung ini harus mampu menarik wisatawan, seperti halnya Pesta Kesenian Bali (PKB).

Bisa juga, pagelaran di gedung ini disesuaikan dengan paket wisata. Tentu saja, wisata religi, batik, kuliner, dan alam di Kabupaten Cirebon juga harus direvitalisasi dan dikembangkan.

Fungsi keempat, selain

sebagai pusat seni pertunjukkan, gedung kesenian ini juga bisa menjadi etalase karya seni lainnya, seperti batik, lukisan kaca, rotan, dan gerabah. Para penikmat seni pertunjukan sekaligus juga dapat menikmati dan membeli karya seni khas Cirebon lainnya.

Dengan berjalannya empat fungsi tersebut, harapannya (ujungnyanya), gedung kesenian akan menjadi pusat penggerak ekonomi kreatif. Kesenian Cirebon tetap lestari, seniman sejahtera, Cirebon pun bahagia.

Selain itu, akan lebih menarik jika agenda event di Gedung Kesenian juga terintegrasi dengan kegiatan bidang lain, seperti event olahraga nasional maupun internasional.

- Pembuatan gedung kesenian
- Pembuatan sanggar seni di setiap kecamatan
- Membuat agenda kesenian secara berkala yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata
- Pembinaan sanggar-sanggar seni

# Branding

Jika Kabupaten Cirebon ingin katon secara nasional atau bahkan dilihat dunia, maka pantaskan diri agar enak dilihat; juga disusun brand yang serius, yang bukan sekadar katon nyomote.



Saya kerap ditanya, baik oleh orang Cirebon maupun tamu dari daerah lain: “Cirebon Katon itu apa Kang? *City branding*, *destination branding*, atau slogan daerah?” Saya jawab singkat: nama majalah DPRD. Kadang sambil saya tunjukkan

beberapa edisi Majalah Cirebon Katon.

Sontak, mereka kebanyakan malah tertawa. Padahal itu jawaban serius saya dan sesuai fakta. Tentu saja mereka tidak hanya berhenti dengan tertawa, berikutnya beberapa pertanyaan justru malah

memberondong saya.

Pertanyaan mereka sebenarnya pertanyaan saya juga dulu. Karena saya tidak menemukan jawaban rasional atas pilihan kata ‘katon’ setelah Cirebon, maka kata itu saya pilih sebagai nama majalah DPRD. Nama *Cirebon Katon* menggantikan nama majalah sebelumnya: *Bewara*.

Kenapa? Karena saya pikir *Cirebon Katon* memang lebih cocok untuk nama majalah, ketimbang *city branding*, *destination branding*, atau slogan daerah. Sebagai sebuah media, majalah DPRD juga harus mengedepankan fakta, kebaikan dan kekurangan disodorkan apa adanya. Nah, *katon* (terlihat) mewakili semangat objektivitas tersebut.

Kalau disebut *branding* dimana aspek *branding*-nya? Adakah elemen dan atribut *branding* dari frase *Cirebon Katon*? Siapa target pasarnya, internal (masyarakat Cirebon) atau eksternal (wisatawan)?

Coba bandingkan dengan deretan *city branding* berikut: *Colorful Medan*, *Wonderful Riau Island*, *Enjoy Jakarta*, *Stunning Bandung*, *Java Cultural Wonders*, *Majestic Banyuwangi*, *Bali the Island of Gods*, *Friendly Lombok*, *Explore Makassar*, serta *Coral Wonders* untuk Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat.

Dari deretan *city branding* tersebut jelas terlihat keunggulan daerah yang dikemas menjadi identitas daerah, dan syarat dengan nilai yang ditawarkan/dijual kepada wisatawan. Banyuwangi misalnya dengan kata *majestic* ingin menawarkan keagungan budaya (tari gandrung), kemegahan *landscape* (Gunung Ijen), dan kehebatan wisata pantai (ombak terbesar kedua di dunia).

Nilai yang ditawarkan Banyuwangi jelas, keunggulan dan kekhasan daerah, yang menjadi identitas sekaligus pembeda dengan daerah lain. Target pasarnya juga jelas, wisatawan dari luar daerah atau luar negeri.

Bagaimana dengan *katon*? Menawarkan apa ke wisatawan? Apa kekhasan Cirebon yang jadi identitas daerah? Bahkan ada yang sinis di media sosial: *katon sampaha*, *katon jalan berlubange*, dan *katon banjire jeh*.

Saya berpikir positif, bahwa *Cirebon Katon* ini lebih cocok untuk *internal branding*, memompa internal masyarakat Cirebon agar semangat menunjukkan Cirebon. Untuk itulah salah satunya saya gunakan sebagai nama majalah DPRD.

Urusan *branding* ini bukan hal sepele yang asal comot. Perlu ada riset dan kajian yang mendalam, dan yang lebih penting adalah aktivasi *brand*, setelah *brand* itu dibuat. Penyusunan *brand* dan aktivasi *brand* harus dibuat secara matang dengan strategi yang terpadu.

- Mem-branding Cirebon yang berorientasi pada pariwisata dan investasi
- Melakukan promosi yang berkualitas
- Penguatan nilai budaya dan kearifan local pada *city branding*

Cirebon ke depan harus memiliki *city/destination branding* tersendiri yang disusun berdasarkan kajian yang kuat dan mendalam. Sehingga eksternal *branding* itu akan padu dengan internal *branding* (internalisasi visi daerah), dan kebijakan pembangunan Cirebon ke depan.

Akan lebih menarik lagi jika *city branding* ini juga bisa selaras dengan *branding* kawasan yang digagas

pemerintah provinsi Jawa Barat. Pada 8 November 2023, Pemprov Jabar meluncurkan nama *Cirebon Raya* untuk menggantikan nama *Ciayumajakuning*.

Meski Pemprov Jabar mengklaim itu sebagai sebuah *rebranding*, namun hingga kini belum terlihat aktivasi dari *branding* itu. Saat ini, yang terlihat baru ganti nama dari *Ciayumajakuning* menjadi *Cirebon Raya*.

Semoga ke depan, niat baik Pemprov Jabar ini bisa ditindaklanjuti dan dapat selaras dengan *branding* Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyusun tim khusus, bahkan jika diperlukan menggandeng profesional *city branding*. Mereka harus mengkaji, riset, dan menyusun *brand* Cirebon secara serius.

# Olahraga

Komunikasi anggaran dengan pemerintah Provinsi dan Pusat harus terjalin baik; di sisi lain pengurus komite jangan terus berkonflik.



**Selain prestasi, Olahraga harus jadi penggerak ekonomi**

Salah satu masalah olahraga di Kabupaten Cirebon bukan hanya tentang Olahraga Prestasi (Opres). Tampaknya juga bermasalah pada Olahraga Pendidikan (Open) dan Olahraga Masyarakat (Omas). Di Olahraga Pendidikan perlu penguatan bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) bukanlah sekadar pelajaran pelengkap.

Kebanyakan siswa beranggapan bahwa PJOK tidak berperan pada prestasi dan kelulusan, karena bukan mata pelajaran ujian sekolah. Padahal dengan olahraga dan jasmani yang sehat akan lahir pribadi-pribadi dengan jiwa dan pikiran yang sehat. Artinya dalam PJOK perlu ditekankan peran strategis olahraga dalam pencapaian akademik.

Sedangkan Omas kebanyakan berjalan secara mandiri. Baik dilakukan oleh pribadi maupun organisasi masyarakat. Selain itu, sering kali mendapatkan kendala mengenai sarana dan fasilitas olahraga yang kurang memadai. Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk mendukung Omas.

Namun demikian, kita patut mengapresiasi masyarakat yang terus menggelar turnamen atau pertandingan Omas, terutama dari sisi mengolahragakan dan menghibur masyarakat. Jika Omas juga mendapatkan perhatian pemerintah, seharusnya juga menjadi ujung tombak pencarian bibit unggul atlet Opres.

Di sisi lain, pembinaan Opres yang diharapkan mampu mendongkrak prestasi juga selalu dirundung ironi yang tak berkesudahan. Kisruh pengurus komite olahraga masih melanda, persiapan berbagai turnamen dan pekan olahraga tak maksimal.

Ketika pengurus komite olahraga sibuk dengan kepentingan pribadi dan golongannya maka sulit prestasi olahraga sebuah daerah terwujud. Terlebih konflik itu berakar pada rebutan kue anggaran.

Ini jelas merupakan indikator bahwa mereka bukanlah insan olahraga. Insan olahraga adalah manusia yang sehat mental, jasmani, dan jiwanya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjunjung tinggi sportivitas dan *fair play*, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan.

Bagaimana jadinya ketika olahraga justru diurus oleh orang-orang yang tidak bermental olahraga (sportif)? Tentu minim prestasi bukan? Kalaupun

ada prestasi biasanya saling mengklaim dirinya-lah yang paling berperan atas prestasi tersebut. Berprestasi ribut, tidak berprestasi juga ribut. Bahkan, pasca berprestasi juga ribut, ketika sang atlet dibajak daerah lain. Karena faktor kesejahteraan dan rendahnya perhatian pengurus dan pemerintah, sang atlet berprestasi pun memilih pindah ke daerah lain yang lebih menjanjikan. Pada titik ini kemudian pengurus dan pemerintah kembali ribut, saling menyalahkan.

Dari deretan masalah tadi maka sebenarnya masalah olahraga adalah bukan pada keberadaan bibit unggul dan talenta-talenta yang andal, pada mental pengurus dan pemerintah. Peran pemimpin daerah harus mampu mengendalikan mental dan kinerja jajarannya.

Perlu adanya sentuhan pemerintah dalam Open dan Omas agar menjadi *support system* bagi Opres. Sedangkan bagi Opres sendiri, perlu adanya pembenahan mental pengurus, manajemen, dan penerapan *sport science*.

Di sisi lain, demi tersedianya sarana yang memadai, pemerintah harus pro aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat agar sarana yang mangkrak segera selesai. Dana dari provinsi dan pusat tersedia, namun karena lemahnya komunikasi dan lobi dari Pemkab, anggaran itu tak mengalir ke Kabupaten Cirebon.

Jika pengurus komite tidak berkonflik, pemerintah aktif, sarana tersedia, *sport science* diterapkan, ke depan olahraga di Cirebon akan berubah menjadi Olahraga Industri. Olahraga juga akan mendukung tumbuhnya ekonomi dan pariwisata, dengan digelarnya berbagai *event* nasional dan internasional.

Perlu adanya sentuhan pemerintah dalam Open dan Omas agar menjadi *support system* bagi Opres. Sedangkan bagi Opres sendiri, perlu adanya pembenahan mental pengurus, manajemen, dan penerapan *sport science*.

Di sisi lain, demi tersedianya sarana yang memadai, pemerintah harus pro aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat agar sarana yang mangkrak segera selesai. Dana dari provinsi dan pusat tersedia, namun karena lemahnya komunikasi dan lobi dari Pemkab, anggaran itu tak mengalir ke Kabupaten Cirebon.

Jika pengurus komite tidak berkonflik, pemerintah aktif, sarana tersedia, *sport science* diterapkan, ke depan olahraga di Cirebon akan berubah menjadi Olahraga Industri. Olahraga juga akan mendukung tumbuhnya ekonomi dan pariwisata, dengan digelarnya berbagai *event* nasional dan internasional.

Perlu adanya sentuhan pemerintah dalam Open dan Omas agar menjadi *support system* bagi Opres. Sedangkan bagi Opres sendiri, perlu adanya pembenahan mental pengurus, manajemen, dan penerapan *sport science*.

- Menyelesaikan pembangunan Stadion Watubelah
- Pembinaan olahraga Pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi
- Peningkatan kesejahteraan atlet
- Pembuatan kegiatan pertandingan olahraga secara berkala dan terintegrasi dengan kegiatan pariwisata
- Peningkatan sarana olahraga di masing-masing cabor

# Kependudukan

Layanan administrasi kependudukan ke depan harus prima: cepat, gratis, dan tidak pakai antri.

**Semua layanan administrasi sekarang dah cepet... seperti jalan tol...**



**K**ita masih tergepoh dengan pencetakan layanan administrasi dasar, sementara pemerintah pusat sudah mulai mengenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Keter-

tinggalan Kabupaten Cirebon apakah hanya pada persoalan alat perekam dan pencetak e-KTP saja? Hingga 2023, terdaftar ada 33 kecamatan yang bisa menerima perekaman dan layanan e-KTP di

tingkat kecamatan. Begitu pun sudah tersedia *prototype* layanan perekaman secara *mobile* (keliling) dengan menggunakan roda dua.

Secara sarana, jelas peralatan itu kurang jika mengacu pada jumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon yang mencapai 40. Begitu pun layanan *mobile* yang masih uji coba, unit masih terbatas.

Untuk tahap ini idealnya alat perekaman KTP tersedia di setiap kecamatan, minimal satu unit per kecamatan. Untuk kecamatan yang 'gemuk', atau berpenduduk banyak, bisa didukung dengan unit *mobile*.

Selain soal sarana ada beberapa hal lain yang juga tidak kalah penting. Pertama, mental aparat pemerintah yang belum sepenuhnya terinternalisasi tentang layanan prima. Alat tersedia, namun kadang ada saja oknum yang bermain mempersulit layanan.

Banyak warga yang mengeluhkan ketika membayar *uang pelicin*, baru upaya mereka mengurus administrasi kependudukan dipermudah. Jelas mental ini harus diberantas. Caranya bisa dengan pembinaan mental, bisa juga dengan penerapan sistem yang ketat.

Untuk penerapan sistem ini, diperlukan perangkat yang kedua, yakni data yang terpadu yang setiap saat *ter-update* di tingkat desa, yang kami beri nama *single data system* (SDS). SDS ini minimal merekam aktivitas kependudukan berupa pernikahan, kelahiran, kematian, pindah alamat, dan jenjang Pendidikan.

Dengan perekaman di tingkat desa tersebut, bahkan sistem itu memungkinkan untuk warga *update* via ponselnya masing-masing, data akan tersedia dengan tingkat presisi yang bagus. Data ini akan memudahkan pemerintah memberikan

layanan administrasi kependudukan. Bahkan, dalam waktu yang singkat bisa terlayani.

Sebagai contoh dengan data kelahiran, maka jauh-jauh hari, bahkan beberapa tahun sebelumnya, pemerintah sudah bisa memprediksi kebutuhan perekaman dan pencetakan KTP baru per desa di setiap bulannya. Dengan ini maka tidak alasan lagi mengenai blangko kosong, karena kebutuhan sudah diperkirakan jauh-jauh hari.

Sedangkan untuk kebutuhan kartu yang bersifat insidental, seperti KTP hilang atau rusak, pun bisa dilayani dengan cepat. Melalui aplikasi SDS warga tak perlu antri mengajukan permohonan, bisa

dilakukan via ponsel dan tinggal ambil dengan waktu yang sudah ditentukan.

Dengan SDS ini layanan kebutuhan administrasi kependudukan lainnya seperti KK, akta kelahiran, dan surat kematian bisa tersedia dengan cepat. SDS bahkan dapat diintegrasikan dan mendukung layanan BPJS atau bantuan sosial lainnya. Sehingga cerita data penerima yang tidak sinkron tidak boleh lagi terdengar. SDS juga akan memudahkan ketika ke depan warga diharuskan migrasi ke IKD

Jadi untuk meningkatkan layanan prima kependudukan setidaknya diperlukan dua hal. Pertama, visi layanan prima harus terinternalisasi pada setiap aparat pemerintah dan dipastikan mereka mempraktikkannya. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan yang memadai, termasuk pemberian sanksi jika dibutuhkan.

Kedua, tersedianya sarana, berupa alat rekam di setiap kecamatan, bila memungkinkan di setiap desa. Kebutuhan sarana lainnya adalah adanya perangkat lunak berupa SDS, dan koneksi yang baik agar SDS terintegrasi se-Kabupaten Cirebon.

- Peningkatan sarana dan peralatan pelayanan KTP, KK, dan Akte di setiap kecamatan dan desa
- Peningkatan layanan mobile administrasi kependudukan
- Membuat single data system
- Penerapan layanan berbasis daring.

# Kesehatan

UHC harus segera 100%, plus dukungan infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang mumpuni, mulai dari Polindes, Poskedes, Puskesmas, hingga RSUD.



**RS gratis, pelayanan mantap...**

Sering kita mendengar celetukan: “Orang miskin tidak boleh sakit,” atau “Gara-gara sakit jadi miskin.” Seolah-olah, layanan kesehatan prima hanya untuk orang kaya. Padahal dengan keberadaan jaminan kesehatan semesta atau

*universal health coverage* (UHC) orang miskin pun harusnya mendapatkan layanan prima.

Kabupaten Cirebon kini semakin mendekati angka 100% UHC. Pada Maret 2023 mencapai 96,07%, dan pada Desember 2023 sudah 99,45%.

Harusnya Pada 2024 sudah mencapai 100%. Ini tidak bisa ditawar lagi: UHC 100%.

Ini artinya semua warga Kabupaten Cirebon sudah terdaftar mendapatkan jaminan kesehatan via BPJS. Dengan hanya bermodalkan KTP Kabupaten Cirebon harusnya sudah bisa mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan ketika terjadi risiko.

Namun demikian beberapa waktu yang lalu, yang notabene UHC sudah mendekati 100%, justru sebagian perangkat desa justru BPJS berstatus non-aktif. Lagi-lagi mental aparat belum sepenuhnya memberikan layanan prima.

Begitu pun dengan layanan yang didapati para peserta BPJS di rumah sakit. Mereka sering dianggap sebagai warga kelas dua. Tak pantas mendapatkan layanan prima. Pasien umum atau pemegang asuransi lain dilayani lebih manusiawi.

Padahal dengan BPJS juga, layanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien bukan cuma-cuma. Sama dibayar, seperti halnya pasien umum atau pemegang asuransi lain. Jika ada persoalan layanan BPJS ke rumah sakit yang kurang baik, maka tugas BPJS untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk menjawab hal itu bisa juga dengan peningkatan layanan RSUD. Sebagai rumah sakit pemerintah, RSUD harus menjadi garda terdepan memberikan layanan prima demi mendukung UHC 100%. Tanpa layanan prima, UHC 100% menjadi kurang berarti. Bahkan sia-sia, ketika masyarakat justru tidak menggunakan fasilitas UHC.

Untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap RSUD bisa dilihat dari *turn of interval* (TOI, atau interval dari selesai dipakai ke pemakaian berikutnya) penggunaan tempat tidur di RS. Dari kapasitas 368 tempat tidur, TOI di RSUD Arjawinangun 4,2 hari dan RSUD Waled dengan jumlah tempat tidur

355, TOI-nya 5,9 hari (Profil Kesehatan, Dinkes Kab. Cirebon)

Bandingkan dengan RS Mitra Plumbon, dengan kapasitas 407 tempat tidur, TOI 1,1 hari; RS

Sumber Waras dengan kapasitas 179 tempat tidur, TOI 2,5 hari; dan RS Sumber Hurip dengan kapasitas 100 tempat tidur, TOI 1,6 hari.

Data tersebut menunjukkan bahwa tempat tidur kosong di RSUD rata-rata selama 4 sampai 6 hari, sedangkan di RS swasta hanya kosong dalam 1 sampai 2 hari. Data ini merupakan cerminan bahwa masyarakat lebih memilih RS swasta ketimbang RSUD.

Tentu saja kualitas pelayanan menjadi jawaban kenapa masyarakat lebih memilih RS swasta ke-

timbang RSUD. Untuk itu, kualitas pelayanan RSUD harus selalu ditingkatkan. Baik dengan melengkapi dan memperbaharui sarana alat kesehatan, maupun dengan peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan.

Selain RSUD, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga harus dilakukan di tingkat Puskesmas, baik Puskesmas rawat jalan, inap, maupun Puskesmas dengan Penanganan Obstetri Neonatal

Emergensi Dasar (PONED).

Dari 60 Puskesmas, baru 11 Puskesmas rawat inap dan 35 Puskesmas PONED. Ke depan semuanya harus bisa menjadi Puskesmas rawat inap dan PONED, atau setidaknya ada satu Puskesmas rawat inap dan PONED di setiap kecamatan.

Kecepatan penanganan kesehatan masyarakat juga harus didukung dengan keberadaan Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Poskedes (Pos Kesehatan Desa) yang berdiri di semua desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, jaminan kesehatan UHC 100% akan bermanfaat penuh dengan ketersediaan infrastruktur kesehatan dan layanan yang paripurna.

- UHC 100%
- Peningkatan sarana Kesehatan di RSUD, Puskesmas, Polindes dan Poskedes
- Peningkatan layanan Kesehatan berbasis daring
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

# Ibukota Sumber

Sumber sebagai ibukota harus tumbuh dengan perencanaan yang baik. Visi ibu kota harus berbasis teknologi, asri, nyaman, dan tetap mengedepankan kearifan lokal.



**Ini baru Ibukota Sumber: tertib, bersih, nyaman, dan canggih.**

**A**pa yang Anda bayangkan tentang Sumber masa depan? Relakah kita Sumber sebagai ibukota kabupaten, tumbuh tanpa perencanaan, penuh dengan kekumuhan, kesemrawutan, dan keruwetan masalah sosial? Sebelum itu terjadi, visi dan perencanaan Kota Sumber harus digagas secara serius.

Sejak 1999, sebenarnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengkaji dan mencanangkan tentang visi kota di Indonesia masa depan. Setidaknya ada empat unsur yang harus ada pada visi dan perencanaan pembangunan sebuah kota.

Pertama, adanya sentuhan teknologi di berbagai

sistem dan sub sistem pembangunan kota. Kedua, tumbuhnya kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga, pendekatan sistem dan penataan ruang kota berdasarkan pemecahan masalah secara multidimensi, multidisipliner, interdisipliner, dan intradisipliner, sehingga kompleksitas masalah dapat terselesaikan dengan baik. Keempat, keterpaduan orientasi, perencanaan, kemitraan, dan partisipasi seluruh *stakeholder* masyarakat.

Sumber resmi menjadi ibukota Kabupaten Cirebon berdasarkan PP Nomor 33/1979, dan ditempati sebagai ibukota pada 1988. Pertanyaannya apakah Kota Sumber dibangun dengan sebuah visi dan perencanaan yang matang? Setidaknya, setelah visi kota-kota di Indonesia dicanangkan pemerintah pusat, sudahkah Kota Sumber mengadopsinya?

Tentu saja kita tak perlu memperdebatkan hal itu sudah dilakukan atau belum. Tidak ada gunanya, hanya menghabiskan energi. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana merumuskannya untuk Kota Sumber ke depan. Sebelum Kota Sumber tumbuh dalam kelir keruwetan, atau dalam ke-*mandekan*.

Kita harus merumuskannya mulai dari sesuatu yang abstrak berupa visi Kota Sumber ke depan. Jika diperlukan, visi ini dapat dibuat dalam dokumen resmi berupa Perda. Di dalamnya, sekaligus memuat tentang rencana tata ruang Kota Sumber baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Selain perencanaan tata ruang yang mengacu pada keempat unsur di atas, Kota Sumber di tata dengan lanskap yang menjunjung tinggi nilai-nilai estetis. Kota harus asri, indah, dan nyaman, baik bagi penghuni dan para tamu.

Akses jalan menuju sumber juga harus diting-

katkan baik secara jumlah maupun kualitas jalan. Misalnya, jalan akses dari Jalan Tuparev via Kedawung harus ditingkatkan dan diperlebar, atau membuka jalan baru yang menghubungkan akses pintu tol Ciperna ke Sumber.

Perlu juga dibangun jalan lingkar menuju Kota Sumber. Sehingga warga Cirebon Timur dan Cirebon Utara dapat lebih mudah dan cepat menuju Sumber tanpa harus melalui Kota Cirebon terlebih dahulu.

Tentu saja pembangunan Kota Sumber juga harus terintegrasi dengan rencana pembangunan

Kawasan Industri Cirebon Timur dan Kawasan Pariwisata Trusmi-Gunungjati. Salah satunya, dengan meningkatkan akses jalan menuju Sumber dari arah Weru.

Jika mengacu pada visi kota di Indonesia yang dicanangkan pemerintah pusat maka, Kecamatan Sumber termasuk kategori kota besar karena sudah berpenduduk lebih dari 100.000. Dengan demikian, pengembangan Kota Sumber juga harus diintegrasikan dengan rencana pengembangan transportasi publik.

Transportasi publik

yang berbasis teknologi menjadi elemen penting dalam perencanaan kota besar. Bahkan, keberadaan transportasi publik masa depan menjadi sebuah keharusan. Ini menarik jika transportasi publik di Kabupaten Cirebon bisa terpadu dengan akses pintu tol, stasiun kereta, pelabuhan dan bandara.

Untuk itu semua, strategi lagi-lagi berperan penting, baik dalam pembuatan visi, perencanaan, dan tahapan pembangunan dan pengembangan. Strategi pengembangan Kawasan Ibukota Sumber harus selaras dengan rencana besar pembangunan Kabupaten Cirebon.

- Peningkatan akses jalan menuju Ibukota Sumber
- Penataan Ibukota Sumber yang asri dan nyaman
- Tersedianya transportasi publik yang memadai dan nyaman
- Tata ruang Ibukota Sumber yang terintegrasi dengan kawasan strategis wisata dan kawasan industri

# BUMD

BUMD harus menjadi ujung tombak pemantik peningkatan kesejahteraan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya.



## Nah gitu... BUMD harus untung...

**K**emiskinan dan pengangguran jadi sorotan. Sudahkah pemerintah Kabupaten Cirebon menyelesaikan masalah ini dengan menciptakan lapangan kerja? Sudahkah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tumbuh dan menjawab permasalahan itu?

BUMD idealnya memiliki empat fungsi. Pertama, mampu menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, memaksimalkan

potensi daerah, baik sumber daya alam, sejarah, maupun manusia. Ketiga, dapat berperan sebagai penyeimbang kekuatan pasar. Keempat, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai laba BUMD.

Bagaimanakah dengan BUMD di Kabupaten Cirebon? Sudahkah empat fungsi itu berjalan? Untuk menjawab hal ini, perlu kita melihat kiprah

BUMD yang ada di Kabupaten Cirebon.

Jika mengacu pada Perda, saat ini baru ada empat BUMD di Kabupaten Cirebon. Tiga BUMD sudah operasional, dan satu BUMD belum operasional sejak didirikan. BUMD yang sudah operasional, pertama adalah Perumda Air Minum Tirta Jati (PDAM Tirta Jati).

PDAM Tirta Jati ini juga sering jadi sorotan karena kondisi keuangan yang kerap diisukan atau diberitakan merugi. Per 31 Desember 2021 sesuai dengan laporan auditor independen sudah mengalami keuntungan mencapai Rp 916 juta, dan Rp 1,4 miliar pada 2022.

Jika mengacu pada Perda Nomor 11 tahun 2011 dan perubahannya Perda Nomor 3 tahun 2019, maka dari laba bersih itu alokasi untuk pemerintah daerah sebesar 55%. Artinya sumbangan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PDAM Tirta Jati hanya berkisar Rp 770 juta.

BUMD kedua adalah BPR Cirebon Jabar (BCJ). BCJ adalah *brand name* dari PT (Perseroda) BPR Astanajapura. BPR ini merupakan penggabungan tujuh BPR, yang sebelumnya berbasis di kecamatan-kecamatan, sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2018. Pada 2023 BPR ini membukukan laba sekitar Rp 7 miliar.

BUMD ketiga juga BPR, yang merupakan hasil penggabungan 12 BPR, sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2018. BUMD ini berbadan hukum Perumda, yakni BPR Kabupaten Cirebon (BKC), yang merupakan *brand name* dari BPR Babakan. Pada 2021 berhasil mengantongi laba sekitar Rp 8,7 miliar.

BUMD yang keempat adalah Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa (PPJ). Sejak kelahirannya, pada 14 Desember 2007 (sesuai Perda Nomor 16

tahun 2007), hingga saat ini belum beroperasi sebagaimana layaknya entitas bisnis.

Selain empat BUMD tersebut Pemkab Cirebon juga menempatkan investasi (saham) di BJB, sesuai dengan amanat Perda Nomor 11/2016. Dalam laporan resmi Bank BJB tahun 2023, saham Pemkab Cirebon sebanyak 0,57%, atau 60,015,043 lembar saham, senilai Rp 15.003.760.750.

Dari deretan BUMD tersebut peran PDAM Tirta Jati juga belum maksimal memberikan layanan air bersih, terlebih kinerja keuangan masih belum stabil. Aset dan kinerja BKJ dan KCJ harus dipompa sehingga mampu mengelola arus uang APBD.

Selama ini APBD disimpan dan dikelola melalui BJB.

Dari empat BUMD tersebut yang paling ironis adalah PPJ. Perusahaan didirikan melalui Perda, dibuat pengurus, lalu tidak beroperasi. Untuk itu keberadaan PPJ perlu dikaji ulang: apakah dilanjutkan dengan banyak penyesuaian, atau dihentikan.

Tampaknya dengan kondisi perlunya percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon keberadaan PPJ sangat diperlukan terutama untuk menopang rencana pembangunan kawasan industri, pariwisata, dan ibukota.

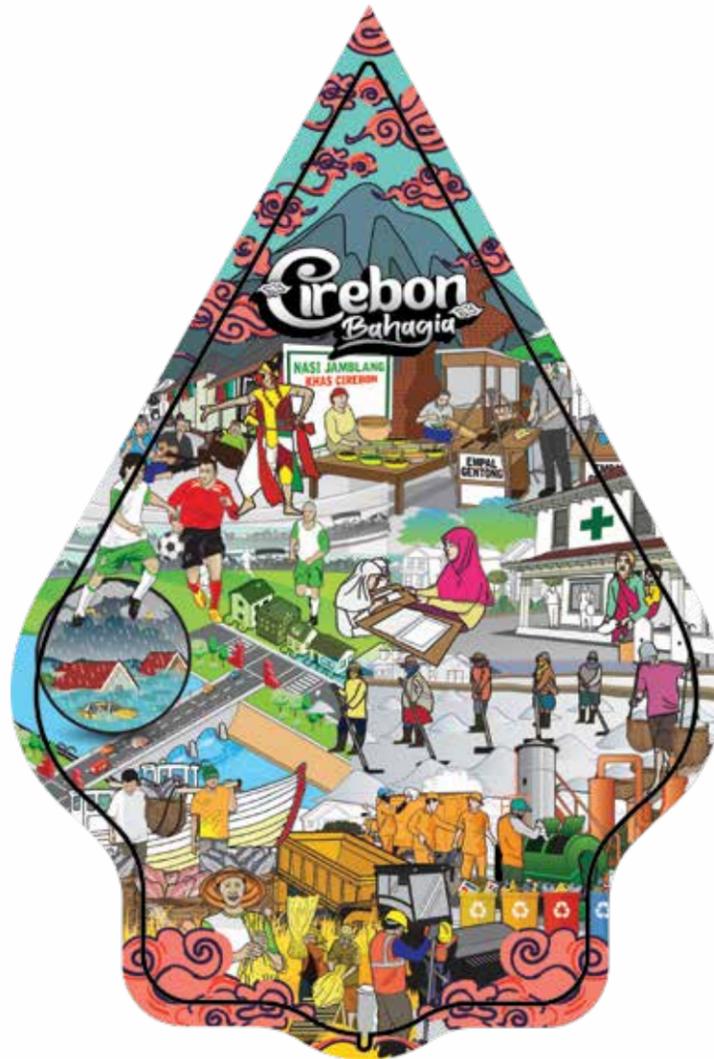
Selain operasionalisasi PPJ perlu juga dibuat BUMD pasar. Beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengutarakan pendirian BUMD ini, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Keberadaan BUMD, baik yang sudah operasional, belum operasional, maupun yang akan berdiri, sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu upaya untuk pembenahan dan pemberdayaan segala potensi ekonomi via BUMD harus serius dijalankan.

- Membesarkan BUMD yang sudah operasional
- Memberdayakan BUMD yang belum beroperasi
- Membuat BUMD baru sesuai dengan potensi yang ada
- Mendorong BUMD agar menjadi induk tumbuh kembangnya Bumdes dan UMKM

## Epilog Inilah Negeri Bahagia

Negeri bahagia bukanlah negeri dongeng. Cirebon Bahagia sudah di depan mata, kecuali bagi orang-orang yang pesimis dan lemah usaha.



Cirebon masa depan adalah Cirebon Bahagia. Pengangguran terpankas, lepas dari kemiskinan, dan sejahtera. Mungkinkah? Ya, tentu saja mungkin. Jika ada yang menjawab tidak mungkin, maka sebaiknya menjauh dari wilayah Cirebon.

Pertama, mari kita bicara indikator atau tolok ukur menuju kebahagiaan. Kemudian berikutnya, bicara tentang cara meraihnya. Saat ini kemiskinan dan pengangguran berada di kisaran 11% sampai 12%, dan itu masuk tiga besar kabupaten paling miskin di Jabar.

PDRB Kabupaten Cirebon Rp 61 triliun, atau pendapatan per kapita per orang per tahun sebesar Rp 25 juta, atau per bulan sekitar Rp 2,08 juta per orang. Masih di bawah UMR Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2,45 juta.

Artinya pendapatan per orang di Kabupaten Cirebon masih di bawah standar kelayakan hidup. Wajar bila mendapat predikat miskin. Untuk itu kita harus berani memasang target PDRB Kabupaten Cirebon harus di atas Rp 100 triliun.

Dengan PDRB sebesar itu maka pendapatan rata-rata per orang per bulan di Kabupaten Cirebon di atas Rp 3,4 juta. Dengan pendapatan sebesar ini, maka angka kemiskinan dan pengangguran akan bisa ditekan di bawah 5%. Predikat sebagai pengangguran terbanyak dan kabupaten termiskin dengan sendirinya hilang.

Begitu pun dengan pendapat pajak. Jika saat ini masih berkutat di angka Rp 700 miliar, maka ditargetkan harus bisa di atas Rp 1 triliun. Bagi yang pesimis tentu saja target angka-angka itu menjawab dengan sulit dan tidak mungkin.

Masalahnya untuk membangun sebuah daerah kita tidak butuh sosok yang pesimis. Kita butuh sosok yang optimis, visioner, kreatif, dan inovatif. Inilah yang akan membukakan mata 'kaum tidak mungkin' menjadi 'kaum yakin bisa'.

Caranya? Atasi kemiskinan dan pengangguran dari hulu. Caranya? Dorong investasi dan industri tumbuh dengan membuat kawasan industri, buat kawasan strategis pariwisata, hidupkan industri kelautan dan perikanan tangkap, tingkatkan produksi dan kualitas pertanian, dorong BUMD dan Bumdes, dan tumbuh kembangkan UMKM.

Industri di Kabupaten Cirebon saat ini baru

menyumbang 20% PDRB atau sekitar Rp 12,4 triliun. Dengan dibangunnya kawasan industri dan beberapa fasilitas pendukung harapannya ke depan minimal mampu menyumbang sekitar 50% PDRB atau lebih dari Rp 50 triliun.

Sedangkan untuk menumbuhkan potensi pariwisata, ke depan harus dibuat kawasan strategis pariwisata (KSP), salah satunya dengan membangun jalan poros pariwisata Trusmi-Gunungjati. KSP akan memadukan wisata religi, kuliner, budaya, seni, dan wisata belanja.

KSP Trusmi-Gunungjati harus menjadi motor

tumbuhnya destinasi wisata lain di luar poros itu, terutama wisata alam di kawasan pantai dan pegunungan. Ini akan menarik jika wisata pantai juga tumbuh bareng dengan produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan pasca tangkap.

Kapal-kapal besar nelayan dan infrastruktur Pelabuhan yang mendukung harus tumbuh di tujuh tempat Pelabuhan ikan di Kabupaten Cirebon. Contoh sukses TPI Karangsong Indramayu bisa ditiru Kabupaten Cirebon. Laut harus kembali menjadi beranda de-

pan Kabupaten Cirebon, seperti halnya kejayaan Pelabuhan Muara Jati masa lalu.

Produksi pertanian harus digenjot dengan memastikan ketersediaan air pada saat kemarau dan penanggulangan banjir pada saat penghujan dengan membangun beberapa embung, setu, atau waduk. Infrastruktur irigasi juga harus tersedia dengan baik, sehingga tidak ada lagi cerita petani baku hantam rebutan air.

Pupuk harus tersedia, pola membangun kerja sama industri dengan sektor swasta harus dibangun, terlebih jika kawasan industri yang akan dibangun juga mem-

### Indikator menuju negeri yang bahagia jika:

- Pengangguran dan kemiskinan di bawah 5%.
- Pendapatan pajak di atas Rp 1 triliun.
- PDRB di atas Rp 100 triliun

produksi pupuk. Begitu juga dengan akses pasar produksi pertanian harus didorong dengan membangun kerja sama dengan kabupaten lain yang membutuhkan komoditi pertanian Kabupaten Cirebon.

Untuk mendongkrak ekonomi juga pemerintah wajib menghidupkan BUMD yang belum operasional, menumbuhkan yang sudah operasional, dan membuat BUMD baru yang potensial dan strategis, terutama dalam mendorong tumbuh kembangnya UMKM.

Jika semua aspek ekonomi ini secara simultan berjalan, maka target-target angka tadi (kemiskinan di bawah 5% dan PDRB di atas Rp 100 triliun) bukan hal yang mustahil. Penghasilan per orang di Kabupaten Cirebon rata-rata bisa di atas Rp 4 juta per bulan bukanlah mimpi lagi.

Namun demikian, untuk mendorong itu semua diperlukan infrastruktur yang memadai. Kelayakan sarana dan prasarana itu sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Lagi-lagi itu adalah tantangan. Selalu ada jalan, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Kuningan. Caranya mereka membuat perencanaan yang baik dan melakukan lobi ke pusat dan provinsi agar dapat mengucurkan anggaran.

Ini sangat miris, beberapa kali saya menghadiri forum-forum di tingkat provinsi dan pusat, mereka justru berkeluh. Sering kali di forum-forum strategis tersebut perwakilan Kabupaten Cirebon yang

diutus adalah eselon tujuh –ini adalah sindiran bahwa yang ditugaskan untuk menghadiri undangan adalah bukanlah seorang pejabat, namun hanya staf yang tidak mempunyai kemampuan lobi dan kewenangan.

Pola komunikasi ke pusat dan provinsi tentu saja harus segera diperbaiki. Lagi-lagi ini berkaitan

dengan kinerja birokrasi dan tentu saja kepala daerah. Birokrasi harus secara bertahap sesuai dengan koridor dari kementerian untuk terus direformasi.

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon juga masuk lima besar terburuk se-Jawa Barat. Ke depan agar mesin birokrasi bisa optimal bekerja, maka pemilihan pejabat harus sesuai dengan keahlian, kapasitas dan kapabilitas.

Tidak ada lagi cerita ASN dengan keahlian teknis –misalnya sebagai bidan— bekerja sebagai pelayan administrasi. Birokrasi harus dibangun secara sehat dengan 100% menutup praktik jual-beli jabatan.

Dengan birokrasi yang sehat, bukan hanya mampu bekerja dengan kecepatan gigi lima dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran, tapi

juga menyelesaikan masalah klasik: banjir, sampah, dan jalan rusak.

Cirebon Bahagia harus dimulai dari birokrasi yang bahagia. Berikutnya baru kita memerangi berbagai masalah di Kabupaten Cirebon, sehingga Cirebon secara umum pun Bahagia.

**Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon juga masuk lima besar terburuk se-Jawa Barat. Ke depan agar mesin birokrasi bisa optimal bekerja, maka pemilihan pejabat harus sesuai dengan keahlian, kapasitas dan kapabilitas.**

**Selain itu harus bersama-sama menolak praktik jual beli jabatan. Cirebon yang bahagia harus dimulai dari birokrasi yang bahagia.**

Edisi Khusus Majalah Cirebon Katon yang berjudul Negeri Empal Gentong ini merupakan penjabaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon yang ditulis oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi.

## Mohamad Luthfi

Pria yang lebih dikenal dengan nama Kang Luthfi ini Kelahiran Desa Klayan, Gunung Jati, Cirebon, 19 September 1977. Ia memulai Pendidikan di SDN 3 Kramat Cirebon, meski akhirnya harus menamatkannya di SDN 2 Cilegon pada 1989, karena mengikuti orang tua yang pindah tugas.

Karena beberapa berpindah tugas orang tua, ia berkesempatan mencicipi Pendidikan di berbagai kota di Nusantara: SMPN 3 Pontianak lulus pada 1992; dan SMAN 3 Semarang lulus pada 1995. Kemudian ia melanjutkan Pendidikan tinggi di STT Telkom, lulus pada 2002; dan Magister Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana lulus pada 2016.

Sebelum menyelesaikan Pendidikan tingginya di DTT Telkom, Kang Luthfi sudah merintis usaha dengan menjadi direktur di PT. Perdana Computindo 2001 – 2006. Kemudian ia menjabat sebagai direktur di PT. Ihsani Graha Utama 2006 – 2018. Selanjutnya agar lebih fokus pada pengabadiannya di Kabupaten Cirebon, ia melepaskan jabatan itu; dan berkonsentrasi penuh sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024.

Dalam berorganisasi, Kang Luthfi pernah diamanahi sebagai Wakil Ketua LPPNU – PBNU 2012 – 2015; Ketua Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cirebon 2015 – 2020; Dewan Pakar / Kehormatan LKKNU Kab. Cirebon 2017 – 2023; dan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Barat 2020-Sekarang.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
Mengucapkan:

# DIRGAHAYU BHAYANGKARA

